



LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

PAMERAN

1 JAN 2004

39

PARADOX MODERNITAS DALAM "PEMBANGUNAN" ORDE BARU

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Peneliti :

Drs. EDY HERRY PRYHANTORO

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
DIP Nomor : 019 /XXIII/3/--/1999 Tanggal 1 Juni 1999
Kontrak Nomor : 022/ P2 IPT/DPPM/99/DM/1999
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud
Nomor Urut : 04

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Januari, 2000

MODERNISM



LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB
KK-2B
303.44
Pry
P

PARADOX MODERNITAS DALAM "PEMBANGUNAN" ORDE BARU



Peneliti :

Drs. EDY HERRY PRYHANTORO

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan
DIP Nomor : 019 /XXIII/3/--/1999 Tanggal 1 Juni 1999
Kontrak Nomor : 022/ P2 IPT/DPPM/99/DM/1999
Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdikbud
Nomor Urut : 04

3000 074013141

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Januari, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | Pembangunan (5995719) |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | 10. Puslit / Kesehatan Repro- |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | duksi |

Kampus C, Jl. Mulyorejo Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246, Surabaya 60115

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
 DOSEN MUDA DAN KAJIAN WANITA

1. a. Judul Penelitian	:	PARADOX MODERNITAS DALAM PEMBANGUNANISME ORDE BARU.
b. Kategori Penelitian	:	I / II / III *)
2. Kepala Proyek Penelitian	:	
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Drs. Edy Herry Pryhantoro
b. Jenis Kelamin	:	Pria
c. Pangkat / Gol. dan NIP.	:	Penata Muda/III b/ 132009468
d. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
e. Fakultas / Jurusan	:	FISIP/Sosiologi
f. Univ./Ins./Akademi/ST *)	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu Yang Diteliti	:	Sosiologi
3. Jumlah Tim Peneliti	:	1 Orang
4. Lokasi Penelitian	:	Surabaya.
5. Bila Penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan sebutkan :	:	
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka Waktu Penelitian	:	5 bulan
7. Biaya yang diperlukan	:	Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Surabaya, 20 Desember 1999



Mengetahui :
 Dekan Fak/Kapuslit :

Sri Sanituti Haryadi, SH, MS.
 NIP. 130 520 541

Ketua Peneliti,

Drs. Edy Herry P.
 NIP. 132009468

Menyetujui :
 Ketua Lembaga Penelitian Unair,



Prof. Dr. Noor Cholies Zaini
 NIP. 130 355 372

RINGKASAN

PARADOX MODERNITAS DALAM PEMBANGUNANISME ORDE BARU (Edy Herry Pryhantoro: 1999, 74 Halaman).

Penelitian ini hendak mengkaji konsistensi antara aplikasi teori modernisasi dan hasilnya yang mewujud dalam kapitalisme di negara berkembang — khususnya Indonesia — dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya serta tujuan pokok modernisasi sebagai suatu "isme", yakni cita-cita menjadi bangsa yang maju dan modern.

Pada umumnya kajian teori pembangunan (modernisasi atau developmentalisme) lebih banyak menggunakan pendekatan struktural-fungsional yang memakai kategori-kategori ekonomis, politis dan teknologis yang diakui bersifat "obyektif". Modernisasi dipandang sebagai proses penataan infra dan supra-struktur masyarakat menurut kriterium-kriterium yang netral dari kesadaran manusia, dimana seolah-olah strukturlah yang menjadi paling penting sementara tugas kesadaran manusia sekedar menyesuakannya. Bahkan seolah-olah mesin yang menggerakkan proses modernisasi sudah dirakit berdasarkan petunjuk-petunjuk obyektif, yang dibutuhkan tinggal tenaga-tenaga untuk menggerakkannya. Padahal seperti ditemukan Berger melalui analisis fenomenologisnya dalam *Pyramids of Sacrifice* (1967) bahwa kesadaran manusia dan struktur dalam modernisasi adalah dua hal yang tidak saling eksklusif, keduanya saling mengandaikan, sebab ilmu dan pengetahuan terapan yang menjadi dasar modernisasi terbentuk dan berkembang dalam media kepentingan (kesadaran) tertentu.

Harna diakui bahwa karena sejak awal munculnya teori modernisasi dimaksudkan untuk mengimbangi pengaruh yang meluas dari ideologi sosialisme-komunisme, maka secara logis "ideologi tersembunyi" dari teori modernisasi adalah ideologi besar Kapitalisme. Penyebaran kapitalisme yang menggunakan teori modernisasi sebagai "kuda troya" (*the trojans horse*) pada akhirnya menimbulkan berbagai krisis manakala sisi gelap kapitalisme (akumulasi modal dan mode produksi yang impersonal) bertemu dengan sisa-sisa feodalisme yang masih kuat atau dengan kepentingan yang

bercokol (*vested interest*) dari sekelompok "elite jahat" yang berkuasa di negara-negara berkembang. Yang muncul kemudian adalah berbagai bentuk monopoli, birokrasi yang korup dan kolusif serta bentuk-bentuk yang lebih spesifik dari kapitalisme seperti *ersatz capitalism*, *networking capitalism* dan *crony capitalism*. Yang disebut terakhir ini terbukti dalam jangka panjang memicu krisis yang berkepanjangan di Indonesia sebab telah menciptakan berbagai kondisi yang kontra produktif bagi proses modernisasi itu sendiri, suatu kondisi yang berlawanan dengan tujuan pembangunan itu sendiri dan menjadi bagian dari apa yang disebut oleh Habermas sebagai "paradox modernitas".

Melalui pendekatan kritis dalam penelitian ini hendak dibongkar mitos-mitos pembangunan dan potensi krisis yang ada di dalamnya. Dan karena penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akar pemikiran atau "ideologi tersembunyi" yang mendasari teori modernisasi adalah kapitalisme-liberalisme maka menjadi hal yang menarik untuk mengkaji penerapan modernisasi di Indonesia dihubungkan dengan model kapitalisme yang kemudian muncul. Sejauh mana model yang lebih spesifik dari kapitalisme tersebut relevan dengan semangat modernisasi yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme subyeknya.

Penelitian ini pada dasarnya adalah analisis kontekstual terhadap situasi zaman ini dengan menggunakan pisau analisis sosiologi kritis. Oleh sebab itu penelitian ini meskipun mengangkat isu-isu yang bersifat teknis ekonomis tetapi lebih menekankan interpretasi historis tentang sesuatu yang mempengaruhi kultur dan menyusun struktur sosial. Dalam bidang Hermeneutika pendekatan ini bisa digolongkan sebagai pendekatan re-kontekstualisasi suatu proses historis atau sebagai usaha memberi *sitz in Leben*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, industrialisasi dan kapitalisme pada dasarnya adalah suatu entitas yang sama. Ketika modernisasi diterapkan di Indonesia ia mewujud sebagai bentuk kapitalisme yang telah terdistorsi oleh berbagai *vested interest* dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengawinkan kekuasaan politik dengan akumulasi modal.

Jika pembangunan adalah suatu usaha manusia secara rasional untuk keluar dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan terhadap sesuatu di luar dirinya, maka ketika pembangunan menjadi sebuah ideologi yang bersifat memaksa dan menundukkan segala hak dan kepentingan individu semata-mata demi tetap berputarnya roda kapitalisme, maka dengan sendirinya usaha untuk membangun tadi menjadi irasional. Usaha pembangunan menciptakan paradox karena justru merupakan proses pembodohan, pemiskinan dan menyebabkan ketergantungan yang lebih besar dari individu kepada institusi yang bernama: negara. (Lemlit Universitas Airlangga Surabaya, Kontrak Nomer: 19/P2IPT/DPPM/VI/1999, tanggal 1 Juni 1999).

SUMMARY

MODERNITY PARADOX IN THE DEVELOPMENTALISM OF THE NEW ORDER REGIME (Edy Herry Pryhantoro: 1999, 74 pages).

This research will explore consistence between the application of modernization theory and its outcome that manifested in the capitalism on the third countries — especially in Indonesia — with the supporting assumptions as well as the main purpose of the modernization as an "ism", that the ideas to achieve the modern and advanced country.

Generally the study of development theory (modernization or developmentalism) usually uses structural-functional approach that engages economic categories, politics and technological recognized it has "objective" nature. Modernization is viewed as processing of the infrastructure and suprastructure of society according to neutrality criteria of human being consciousness in which the structure acts as if the most important subject while human being's consciousness function, however, bring into line or adjust to the structure. Moreover, it seems that the machinery that moves modernization process has been assembled according to objectives directions, so the only needed is the personel to drive. Whereas, as like discovered by Berger according to his fenomenological theory in *The Pyramids of Sacrifice* (1967) that a man's consciousness and his structure in the modernization represent two fact that is not mutual exclusive each others, both mutual suppose due to practical science and acknowledgement that create the modernization and grow in the certain interest media.

It must be acknowledged that due to since beginning of the emerge modernization theory aimed to make balance of spreading influence from the socialism-communism, then

logically "hidden ideology" of the modernization theory is the major ideology: capitalism. Spreading of capitalism that uses modernization theory as "the trojan horse", finally, emerges various crises. When the darkness side of capitalism (capital accumulation and impersonal production mode) meets with the feudalism remains that still have predominant or the vested interests reside from a number of group "evil-elite" that holds the authority in the third countries. The subsequences are the various monopoly, the corrupt bureaucracy, and some specific collusive activities from the capitalism as like ersatz capitalism, networking capitalism, and crony capitalism. The latest of proved to trigger the prolongation crises in Indonesia in the long term because it has created the modernization its self, a situation in which the development objectives is confronted as well as becomes part of what Habermas has called as "modernity paradox".

This research basically represents the contextual analyses toward this era situation using critical sociology point view analyses. So, it nonetheless adopts the issues that have more technical-economic in one hand but deeply attempt historical interpretation about something that affects a culture and arrange social-structural in the other hand. In the hermeneutics this approach can be classified into the recontextualization approach of historic process or as attempt to give *sitz in Leben*.

The result of this research shows that modernization, industrialization and capitalism actually represents same entities. When modernization is applied in Indonesia, it manifest as capitalism from that has been distorted by various vested interests from the interest group marrying politic power and capital accumulation.

If the development resembles the human being's exertion rationally aimed to resolve the stupidity, poverty,

underdevelopment. and dependent from the external power. then the development becomes an ideology that has a coercive power nature and conquered every individual right and interest for the sake of the capitalism driving wheel. Then through the development it's self the above exertion to develop becomes an irrational manner. The development exertion creates a paradox because it is precisely stupidity making, poverty invoking, and induces the more tremendous dependent from individual toward the institution that we call it: nation-state. (The Research Institution of Airlangga University, Surabaya. Contract number: 19/P2IPT /DPPM/VI/1999, June 1 1999).

KATA PENGANTAR

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda negeri ini dalam beberapa tahun terakhir ini berhasil mengukir mitos-mitos pembangunan yang selama 30 tahun terakhir ini telah menjadi kesadaran palsu dalam kolektivitas masyarakat. Cita-cita pembangunan yang retorik pada prakteknya terbukti menciptakan berbagai paradox modernitas manakala pembangunan menjadi bersifat ideologis, sebagai pembangunanisme.

Penelitian ini mencoba memasukkan beberapa analisis yang bersifat kritis terhadap praktek pembangunan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Maksud ini didasari oleh suatu harapan agar berbagai wacana teori kritis yang selama ini sekedar menjadi *rational world* bisa menemukan penerapannya dan menemukan manfaatnya dalam pembahasan mengenai teori pembangunan dan hasil-hasilnya.

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik sebagai lembaga maupun perorangan, yang mengingat sempitnya ruang, tidak disebutkan satu persatu di sini. Kepada mereka semua ucapan terima kasih saya sampaikan. Terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kemahabijaksanaan-Nya telah memberikan ketenangan pikiran, konsentrasi dan kesehatan sehingga studi ini bisa terselesaikan.

Surabaya, 20 Desember 1999

Peneliti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	11
RINGKASAN DAN SUMMARY	111
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
II.1. Modernisasi Sebagai Keniscayaan Sosial ...	13
II.2. Analisis Max Weber Sebagai Akar Pemikiran Modernisasi	18
II.3. Teori Kritis Sebagai Usaha Pencerahan	21
II.4. Krisis Dalam Masyarakat Teknokratis	24
II.5. Relevansi Teori Kritis Terhadap Studi Pembangunan	27
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	28
III.1. Tujuan Penelitian	28
III.2. Manfaat Penelitian	30
BAB IV METODE PENELITIAN	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	36
V.1. Sumber Kekuasaan dan Legitimasi Orde Baru	36
V.2. Paradox-paradox Dalam Pembangunan	48
V.3. Kapitalisme Kroni dan Krisis Dalam Pembangunanisme	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN



I.1. Latar Belakang Masalah.

Penelitian ini hendak mengkaji konsistensi antara aplikasi teori modernisasi dan hasilnya yang mewujudkan dalam kapitalisme di negara berkembang — khususnya Indonesia — dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya serta tujuan pokok modernisasi sebagai suatu "isme", yakni cita-cita menjadi bangsa yang maju dan modern.

Cita-cita manusia (Barat) untuk menjadi manusia modern pertama kali muncul sejak menyingsingnya fajar *Renaissance* (abad 14 M), dan setelah melalui periode Pencerahan (*Aufklarung*) dan dipertegas oleh Revolusi Industri dan Reformasi Protestantisme, mengantarkan bangsa Barat menjadi negara industri modern.

Cita-cita menjadi manusia modern, semangat Pencerahan dengan rasio instrumentalnya, lahir dan berkembangnya kapitalisme, penaklukan benua-benua baru dan konflik antar bangsa adalah benang merah peradaban Barat yang menjadi latar sejarah munculnya konsep modern dan modernisasi.

Konflik antar bangsa yang ditandai dengan dua perang dunia kemudian berlanjut dengan era perang dingin antara blok sosialis dan blok kapitalis sesuai Perang Dunia II. Untuk mengimbangi pengaruh blok Sosialis yang cenderung meluas utamanya di negara-negara yang baru merdeka, maka

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Harry S. Truman sejak 1949 menciptakan suatu formula baru yang merupakan campuran ideologi Pragmatisme dengan teknokratisme dalam bentuk rumusan yang membagi dunia menjadi "negara-negara maju" (Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa Barat) dengan "negara-negara yang belum berkembang" (*underdevelopment*), yakni negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika dan Latin Amerika. Negara-negara yang dikategorikan kelompok terakhir ini diasumsikan akan menjadi negara-negara yang maju — pada saatnya nanti — apabila mampu mengadopsi teori yang kemudian dikenal sebagai konsep modernisasi.

Selanjutnya mulai dekade 50-an kata "*development* atau pembangunan menjadi sangat massif dan cenderung menjadi "agama baru" bagi negara-negara — yang secara sukarela maupun terpaksa — telah menerima stempel atau cap sebagai negara-negara sedang berkembang. Agenda utama penerapan modernisasi kemudian ditenggerai lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan negara-negara maju. Meskipun kepentingan-kepentingan ini berlindung di balik rumusan teori yang mencoba mengadaptasi secara rasional kondisi obyektif negara-negara sedang berkembang.

Pada umumnya kajian teori pembangunan (modernisasi atau *developmentalisme*) lebih banyak menggunakan pendekatan struktural-fungsional yang memakai kategori-kategori ekonomis, politis dan teknologis yang diakui bersifat

"obyektif". Modernisasi dipandang sebagai proses penataan infra dan supra-struktur masyarakat menurut kriterium-kriterium yang netral dari kesadaran manusia, dimana seolah-olah strukturlah yang menjadi paling penting sementara tugas kesadaran manusia sekedar menyesuaikannya. Bahkan seolah-olah mesin yang menggerakkan proses modernisasi sudah dirakit berdasarkan petunjuk-petunjuk obyektif, yang dibutuhkan tinggal tenaga-tenaga untuk menggerakkannya. Padahal seperti ditemukan Berger melalui analisis fenomenologisnya dalam *Pyramids of Sacrifice* (1967) bahwa kesadaran manusia dan struktur dalam modernisasi adalah dua hal yang tidak saling eksklusif, keduanya saling mengandaikan, sebab ilmu dan pengetahuan terapan yang menjadi dasar modernisasi terbentuk dan berkembang dalam media kepentingan (kesadaran) tertentu.

Modernisasi dengan demikian, secara epistemologis, merupakan wujud dari paradigma positivisme yang berasumsi dengan penjelasan tunggal untuk semua bentuk fenomena sosial. Bagi Habermas paradigma semacam ini disebut *instrumental knowledge* dimana pengetahuan menjadi alat untuk mendefinisikan sekaligus selanjutnya mendominasi obyeknya.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai dengan pertengahan 80-an di Indonesia ditengarai masih dominannya pendekatan-pendekatan yang cenderung meremehkan manusia sebagai aktor modernisasi. Manusia sekedar menjadi

obyek pembangunan sehingga muncul gugatan dari pakar ilmu sosial, khususnya sosiologi, pada waktu itu untuk menjadikan manusia sebagai subyek pembangunan.

Teori struktural-fungsional memandang masyarakat sebagai jaringan fungsionalistik menurut pola disposisi rasionalitas instrumental. Pada kenyataannya teori ini hanya sanggup merekam kompleksitas sistem, namun tidak sanggup memperlihatkan segi normatif suatu masyarakat yang memungkinkan transformasinya (Axel Holneth, dalam Giddens: 1987).

Ketidakpuasan yang meluas terhadap pendekatan struktural fungsional dalam modernisasi tidak lepas dari kegagalan berbagai asumsi dasar teori modernisasi, seperti gagalnya teori efek menetes ke bawah (*trickledown effect*), di samping munculnya kesadaran baru dari para teknokrat bahwa teori modernisasi yang mereka kembangkan dan terapkan mengandung mitos-mitos tersembunyi yang secara potensial akan menimbulkan krisis.

Krisis ini secara luas menyangkut harkat kemanusiaan para warga negara berkembang, yang dalam terminologi Berger disebut sebagai biaya sosial. Sedangkan dalam perspektif yang lebih sempit krisis ini menyangkut masalah ekologi, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh bentuk-bentuk spesifik kapitalisme di berbagai negara berkembang.

Harus diakui bahwa karena sejak awal munculnya teori

modernisasi dimaksudkan untuk mengimbangi pengaruh yang meluas dari ideologi sosialisme-komunisme, maka secara logis "ideologi tersembunyi" dari teori modernisasi adalah ideologi besar Kapitalisme. Penyebaran kapitalisme yang menggunakan teori modernisasi sebagai "kuda troya" (*the trojans horse*) pada akhirnya menimbulkan berbagai krisis manakala sisi gelap kapitalisme (akumulasi modal dan mode produksi yang impersonal) bertemu dengan sisa-sisa feodalisme yang masih kuat atau dengan kepentingan yang bercockol (*vested interest*) dari sekelompok "elite jahat" yang berkuasa di negara-negara berkembang. Yang muncul kemudian adalah berbagai bentuk monopoli, birokrasi yang korup dan kolusif serta bentuk-bentuk yang lebih spesifik dari kapitalisme seperti *ersatz capitalism*, *networking capitalism* dan *crony capitalism*. Yang disebut terakhir ini terbukti dalam jangka panjang memicu krisis yang berkepanjangan di Indonesia sebab telah menciptakan berbagai kondisi yang kontra produktif bagi proses modernisasi itu sendiri.

Alasan lain di luar itu adalah dengan munculnya pemikir-pemikir baru seperti Gunnar Myrdal, Peter L. Berger, Paulo Freire dan E.F. Schumacher yang semuanya ini masih meraba-raba dalam mencari teori pembangunan yang paling tepat bagi negara sedang berkembang. Fenomena ini tidak lain adalah reaksi kritis terhadap teori-teori pembangunan yang selama tiga dasawarsa terakhir ini sangat laku di negara berkembang. Di samping itu juga dengan

semakin berkembangnya wacana (diskursus) yang lebih kritis dari ilmu-ilmu sosial produk Eropa, seperti diintroduksinya sosiologi kritis di bidang sosiologi dan varian Neo-Marxisme dari Antonio Gramsci di bidang ilmu politik, yang menarik perhatian para ilmuwan sosial generasi 80-an yang seolah-olah memperoleh "pencerahan" dari teori-teori sosial tersebut.

Pendekatan-pendekatan kritis terhadap praktek pembangunan di Indonesia membuka cakrawala baru dimensi-dimensi modernisasi serta membantu masyarakat akademis menguak mitos-mitos yang terselubung di dalamnya. Semakin muncul kesadaran bahwa praktek pembangunan di Indonesia menjadi bersifat ideologis, dalam arti hanya menjadi alat kepentingan sekelompok elite tertentu (ideologi disini diartikan sebagai suatu bentuk kesadaran palsu, sebagai semacam doktrin atau claim tidak wajar demi tercapainya kepentingan kelompok elite tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan elite di sini adalah kelompok militer (Angkatan Darat) yang berkolaborasi dengan investor asing dengan menggunakan teknokrat dan teknokrasi sebagai alat kepentingannya). Dan ketika pembangunan menjadi bersifat ideologis maka ia juga menjadi kesadaran palsu bagi rakyatnya, yang akan menindas segala bentuk emansipasi dan suara kritis rakyat. Dalam konteks inilah pembangunan menjadi "pembangunanisme", menjadi berhala baru yang kepadanya segenap potensi tenaga-tenaga kreatif

(participasi rakyat: dunia akademis, organisasi sosial dan politik) maupun tenaga-tenaga produktif (struktur ekonomi: alat kerja, buruh dan teknologi) ditundukkan demi tetap berjalannya "mesin besar" kapitalisme. Penindasan pembangunan sebagai ideologi (sebagai pembangunanisme) terletak dalam: "semakin intensifnya penundukkan individu di bawah mitos pertumbuhan dan mekanisme penjagaan stabilitas nasional". Dan karena bersifat ideologis itu pula maka penindasan itu hilang dari kesadaran masyarakat, karena legitimasinya terletak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh ketenangan situasi ekonomi-politik yang memungkinkan individu menjadi semakin nyaman. Di samping itu janji-janji pembangunanisme seperti: 'tahap tinggal landas', 'menuju masyarakat adil dan makmur', 'mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi' dan retorika semacam itu menjadi candu bagi rasionalitas individu. Disini rasionalisasi yang menjadi dasar tindakan social justru menjadi irasional.

Masyarakat yang terpesona dengan retorika pembangunanisme tanpa disadari ditelan oleh kekuasaan mesin birokrasi yang menjadi pengendali utama program-program pembangunan sebagai sistem total yang menguasai berbagai bidang kehidupan manusia, bahkan ke bidang kehidupan yang bersifat pribadi (micalnya di bidang kependudukan seperti menentukan jumlah anak, memilih jenis alat kontrasepsi

dll). Dengan mengadaptasi pikiran Herbert Marcuse dapat dikatakan: Dewasa ini kekuasaan melestarikan dan memperluas dirinya tidak hanya melalui pembangunan melainkan sebagai pembangunanisme, dan pembangunan menyediakan legitimasi yang memperkuat kekuasaan politik yang semakin total dan meluas, yang mengabsorpsi segala bidang kebudayaan manusia (lihat Marcuse dalam: Habermas, 1990).

Telah diketahui bersama bahwa adopsi teori modernisasi di negeri ini dibawa dari tradisi pemikiran Amerika yang pragmatis dan utilitarianis. Diketahui pula bahwa pendekatan struktural-fungsional yang berkembang di dalamnya banyak diilhami oleh cara berpikir Parsonian, sementara itu Talcot Parson adalah pengagum Max Weber yang berusaha menjabarkan pikiran-pikiran Weber ke dunia akademis Amerika. Maka tidak berlebihan jika dalam penelitian ini akar permasalahan yang hendak dianalisis — yakni persoalan paradox modernitas dan diskursus tentang kapitalisme yang mendasari proses modernisasi — dicari kembali ke isu yang sejak mula dilontarkan Weber, yakni rasionalitas instrumental sebagai dasar rasionalisasi dalam modernisasi. Apa yang telah diuraikan di atas, yakni yang menyangkut pembangunanisme di Indonesia, sesungguhnya merujuk langsung pada diskursus Teori Kritis (Mazhab Frankfurt) tentang Paradox Modernitas, yang merupakan kritik Mazhab Frankfurt (melalui tokoh-tokohnya: Theodore W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Mar-

Adorno dan Jurgen Habermas) terhadap dunia industrial modern masyarakat barat. Secara singkat Paradox Modernitas dijabarkan sebagai berikut:

Modernisasi yang pada mulanya merupakan pembebasan manusia dari berbagai kungkungan dominasi mitos, ideologi, dan tradisi pada akhirnya menjadi dominasi dalam wajah baru. Otonomi manusia dan kebebasan yang berhasil diraih dengan penghancuran masyarakat tradisional beserta tradisi-tradisi kulturalnya malah kembali raib dalam kerangkeng besi (*iron cage*) birokrasi dan teknologi yang merupakan perwujudan praktis dari rasionalitas yang diraihnya".

Disebut sebagai paradox karena manusia dalam modernisasi, semakin ia mau merasionalkan kehidupannya, malah semakin irasional. Paradox modernitas yang oleh Adorno dan Horkheimer disebut "Dialektika Pencerahan" itu didasari logika kerja: Rasionalisasi tindakan rasional bertujuan telah menyingkirkan pandangan dunia tradisional, tetapi pada gilirannya rasionalisasi itu menggantinya dengan ideologi baru yang bernama teknokratisme, sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melegitimasi proses produksi modern (kapitalisme) (Widyarsono, 1993).

Relevansi melakukan studi yang lebih mendalam tentang paradox modernitas dan mencoba mengaplikasikan hasil pemahaman tersebut dalam kasus konkrit perilaku kapitalisme di Indonesia era Orde Baru, didasari oleh kenyataan bahwa teori-teori modernisasi yang banyak dipelajari di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan

struktural-fungsional dan sering diterapkan dengan sikap a-historis dan berpretensi obyektivistik. Pendekatan yang cenderung terkonsentrasi pada perluasan sistem-sistem birokrasi dan industrial-kapitalistik, tanpa dibarengi refleksi kritis akan menjadikan sistem-sistem tersebut lepas dari kontrol kehidupan sosial-kultural.

Mazhab Frankfurt — dan berbagai teori sosiologi skeptis — telah melakukan sebuah pendekatan kritis-sosiologis sekaligus universal mengenai fenomena modernisasi, sehingga sangat relevan untuk menganalisis bentuk spesifik kapitalisme (sebagai penerapan berbagai teori modernisasi) dan implikasi rasionalitas yang mendasarinya. Meskipun ciri universalistis dari konsep rasionalitas dikembangkan oleh ilmuwan Barat, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa praxis pembangunan di Indonesiapun mengandung imperatif-imperatif rasionalitas yang universal.

I.2. Rumusan Masalah.

Meskipun yang menjadi sasaran teori kritis adalah masyarakat kapitalis-lanjut yang memiliki ciri *one dimensionality* yakni terintegrasinya semua kelas masyarakat ke dalam sistem industrial-kapitalis. sementara kondisi ini belum menggejala pada masyarakat sedang berkembang; tetapi dimensi kedua, yakni dimensi kemiskinan dan penderitaan terbuka menjadi realitas yang mencolok di

negara berkembang, analisis teori kritis tetap relevan juga. Hal ini disebabkan struktur dualistik yang dianalisis teori kritis masuk juga melalui elite negara sedang berkembang (Widyarsono, 1986). Dan karena di negara-negara ini rakyat ditengarai tidak mempunyai peranan aktif — mereka hanya menjadi obyek perencanaan elite maka "kebudayaan elite"-lah yang menjadi kebudayaan resmi. Melalui elite tersebut beberapa dari mekanisme yang diprihatinkan oleh teori kritis menjadi kenyataan. Maka menjadi tugas sekaligus permasalahan yang terpokok dari penelitian ini untuk menelusuri dan mengungkap :

1. Sejauh mana dominasi rasionalitas instrumental melalui perilaku birokrasi dan struktur-struktur ekonomi telah menggejala melalui berbagai kecenderungan teknokratisme dalam rangka pembangunan ?.
2. Termanifestasikan dalam kasus-kasus aktual macam apa sajakah gejala paradox modernitas itu dalam praksis pembangunan di Indonesia era Orde Baru ?.
3. Model kapitalisme macam apakah yang menggejala di Indonesia era Orde Baru — sekurang-kurangnya yang muncul dalam debat dan menjadi wacana publik menjelang runtuhnya Orde Baru ?.
4. Bahwa modernisasi, industrialisasi dan kapitalisme pada dasarnya merupakan entitas yang sama. Melalui pemahaman terhadap praktik modernisasi, orientasi industri dan wajah kapitalisme yang muncul di Indonesia akan

dilihat sejauh mana model kapitalisme tersebut relevan dengan semangat Pencerahan sebagai cita-cita awal modernisasi ?.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Modernisasi Sebagai Keniscayaan Sosial.

Pada umumnya ilmuwan sosial yang memiliki perhatian atas modernisasi cenderung menggunakan standar masyarakat industri Barat yang telah maju sebagai acuan membandingkan masyarakat yang sedang berkembang guna melukiskan proses perubahan yang mengarah kepada transformasi infra dan suprastruktur (lembaga dan nilai-nilai tradisional) yang agaknya dijadikan model modernitas.

Menurut Eisenstadt, "berdasarkan sejarahnya, modernisasi merupakan perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi dan politik yang telah berkembang di Eropa barat dan Amerika Utara dari abad ke-19 dan 20 meluas ke negara-negara Amerika Selatan, Asia dan Afrika (Eisenstadt, 1966:1). Tak ada pilihan lain bagi negara-negara maju eks penguasa kolonial di belahan Asia-Afrika dalam rangka meredam nasionalisme yang meluap dari negara-negara baru merdeka di belahan benua tersebut untuk menawarkan satu paket rekayasa sosial yang lengkap (mulai dari kerangka teoritiknya, kerangka kerja, sarana penunjang, kaum teknokrat sebagai penasehat ahli sampai bantuan modal) yang disebut proyek modernisasi negara-negara dunia ketiga.

Paket rekayasa sosial tersebut diberikan bukan

tanpa maksud tertentu. Perebutan pengaruh dalam konflik ideologis Timur - Barat menjadikan paket tersebut sebagai sarana yang efektif bagi negara-negara industri maju untuk tetap mempertahankan hegemoninya terhadap negara-negara bekas jajahannya melalui transformasi nilai-nilai liberal-kapitalisme. Hegemoni tersebut sangat penting karena berkaitan dengan maju-tidaknya industrialisasi di barat, sebab di negara-negara berkembanglah mereka bisa memperoleh bahan baku bagi proses industrialisasi secara murah dan mempersiapkan negara-negara berkembang tersebut sebagai pasar yang akan menyerap hasil produksinya. Di kemudian hari terbukti bahwa teori-teori itu ternyata dilatarbelakangi kepentingan masyarakat kapitalis Barat yang ingin mengeksploitasi negara sedang berkembang justru dalam kedok memajukan negara berkembang (Sindhunata, 1983:147).

Jadi sejak dari awalnya modernisasi yang segera menjadi orientasi umum di negara-negara sedang berkembang, di dalamnya telah bersifat ideologis sejak mula karena memuat bias kepentingan-kepentingan tertentu. Meskipun demikian semangat untuk mencapai kemajuan telah menjadikan modernisasi sebagai keniscayaan sosial di sebagian besar masyarakat negara sedang berkembang.

Pada umumnya terdapat dua tipe modernisasi, yakni modernisasi sosial dan modernisasi ekonomi, meskipun keduanya saling mengandaikan. Modernisasi ekonomi mempero-

leh bentuknya pada perkembangan ekonomi yang ditandai oleh tingginya tingkat konsumsi dan standar hidup, revolusi teknologi, intensitas modal yang semakin besar dan organisasi birokrasi yang rasional. Model ini mencakup pembentukan sistem pertukaran moneter, peningkatan tingkat skill yang dibutuhkan melalui teknokrasi, mekanisasi, otomasi, akuntansi dan manajemen rasional, spesialisasi pekerjaan dan spesifikasi fungsional, perubahan sistem transportasi dan komunikasi, mobilitas tenaga kerja, distribusi barang dan jasa serta perubahan pola konsumsi. Berbagai model dikembangkan dalam tipe modernisasi ekonomi ini, misalnya Karl Bucher dengan model tiga tahapan (tahap domestik independen, perekonomian kota dan perekonomian nasional). Rostow mengembangkan lima tahapan (tahap tradisi, transisi, *take-off*, maturitas dan konsumsi tinggi (Francis Abraham, 1991:6-7). Asumsi yang melandasi semua teori pertumbuhan adalah adanya proses evolutif dari stagnasi ekonomi menuju konsumsi massa.

Tipe modernisasi yang kedua adalah tipe modernisasi sosial yang meliputi perubahan dalam atribut-atribut sistemik, pola-pola kelembagaan dan peranan-peranan status dalam struktur sosial masyarakat sedang berkembang. Unsur-unsur pokoknya mencakup perubahan sosial yang terencana, sekularisme, perubahan sikap dan perilaku, revolusi pengetahuan dan komunikasi, instrumen kontrak-

tual dalam hubungan sosial serta diferensiasi struktural. Pemikir sosial yang mengembangkan modelnya dalam tipe modernisasi sosial ini diantaranya adalah Max Weber yang menganalisis etos kerja kapitalisme dan meletakkan kerangka konsep tentang rasionalitas. Toennies yang membedakan *Gemeinschaft* yang didasari kehendak alamiah dengan *Gesellschaft* yang didasari kemauan rasional, kepentingan pribadi dan hubungan kontraktual. Demikian juga halnya Durkheim yang merinci tipe masyarakat berdasarkan jenis hubungan sosial, yakni mekanistik dan organik. Redfield tentang kontinuitas folk-urban. Becker dengan antitesis sekuler-suci yang memberikan acuan kerangka konseptual yang efektif bagi studi tentang dikotomi sistem-sistem nilai dalam masyarakat tradisional dan modern. Sementara Hoselitz, Lipset dan yang lainnya menggunakan variabel-variabel pola Parsonian untuk mengidentifikasi seperangkat nilai budaya yang berbeda pada masyarakat tradisional dan modern. Modernisasi sosial ditandai oleh industrialisasi, ledakan urbanisasi, sekularisasi, revolusi harapan yang meningkat, peranan media massa yang semakin besar, bangkitnya kelas menengah secara besar-besaran serta revolusi budaya yang dahsyat (Francis Abraham, 1991:7-8). Pada kenyataannya kedua tipe Modernisasi di atas saling mengandaikan, sehingga peta situasinya menjadi begitu kompleksnya.

Lebih dari itu dalam prakteknya penerapan teori

modernisasi bersifat multi-faset, berbagai model pendekatan seringkali digunakan secara bersama sehingga diperlukan usaha pemetaan teori yang cermat. Untuk itu dalam penelitian ini — dengan merujuk Francis Abraham (1991) — dibedakan adanya 5 model pendekatan dengan masing-masing tokohnya, yakni berturut-turut: model pendekatan Struktural (termasuk di dalamnya Smelser, Rostow, Apter, Hunter Nettle, Robertson, Marion Levy, Eisenstadt dan Huntington); model pendekatan Budaya (termasuk di dalamnya Ralph Pieris, Bellah, Ames, Gellner, Jacobs, Geertz dan Wittfogel); model pendekatan Psikologis (Mc. Lelland, Hagen, Kahl dan Inkeles); model pendekatan Konflik (Marx, Andre Gunder Frank, Dos Santos, Denis Goulet, Ronald Muller, James Petras, Dale Johnson, Colin Leys, James Cockroft dan Pierre Jalee); dan terakhir model pendekatan Proses (Schramm, Lerner, Pye, Pool, Rogers, Doob dan Frey).

Yang patut dicermati adalah, bahwa apapun tipe modernisasi dan model-model yang dikembangkan, pada umumnya di negeri sedang berkembang telah dibentuk lembaga resmi perencanaan nasional (semacam Bapenas) yang menyiapkan cetak biru bagi modernisasi sosial dan ekonomi suatu bangsa. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan dan hasil-hasil yang diperolehnya dapatlah diketahui kecenderungan teori-teori tertentu yang lebih banyak dipakai.

Untuk memahami hal tersebut, meskipun dalam penelitian ini akan digunakan berbagai catatan empirik, baik kualitatif dan terutama kuantitatif, tidak berarti penelitian ini ingin mengkaji modernisasi dan kapitalisme di Indonesia dalam bentuk kinerja teknisnya. Penelitian ini lebih bertujuan mengkaji pembangunan (modernisasi dan kapitalisme) sebagai bentuk pemikiran yang khusus. Sebab pembangunan lebih dari sekedar suatu upaya sosio-ekonomi; ia adalah suatu persepsi yang mengkonstruksi realitas sosial (Berger) dan menjadi mitos yang menghibur masyarakat.

Suatu mitos muncul dan tumbang, tidak tergantung semata-mata pada hasil empiris dan kesimpulan yang masuk akal; mitos muncul dan menghilang, bukan karena salah atau benar melainkan karena mengandung janji-janji atau menjadi tidak relevan.

II.2. Analisis Max Weber Sebagai Akar Pemikiran Modernisasi.

Bersama-sama dengan Marx dan Durkheim, maka Weber adalah tonggak awal yang memancarkan analisis terhadap perubahan masyarakat secara sosiologis. Arti penting Weber adalah bahwa ia melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu (subyektivitas) yang mewujudkan dalam tindakan-tindakan sosialnya dan pandangannya bahwa konsep rasionalitas merupakan kunci

bagi suatu analisis obyektif mengenai anti-anti obyektif yang melandasi tindakan sosial perorangan.

Weber membedakan adanya dua tindakan sosial manusia, yakni tindakan rasional dan tindakan nonrasional. Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan sehingga tindakan tersebut dinyatakan. Tindakan rasional dibedakan antara tindakan yang didasari rasionalitas Instrumental (*zweckrationalitat*) dan tindakan yang didasari rasionalitas yang berorientasi nilai (*Wertrationalitat*). Khusus mengenai rasionalitas instrumental Weber menjelaskan:

"Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (*zweckrationalitat*) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif" (Weber, 1947:117).

Tindakan ekonomi dalam mekanisme pasar yang impersonal merupakan bentuk dasar rasionalitas instrumental ini. Tipe tindakan ini juga tercermin dalam organisasi birokratis. Modernisasi yang berkembang di masyarakat Barat adalah manifestasi dari diberlakukannya rasionalitas instrumental ini. Berbagai penemuan kreatif alat-alat dan mesin-mesin mekanis yang membawa Eropa kepada Revolusi Industri adalah didasari kemauan yang kuat dari para

penemu tersebut menggunakan asas rasionalitas instrumental ini, dan bangkitnya ekonomi *laissez faire* ditengarai didasari oleh konsep maksimisasi yang berakar pada rasionalitas instrumental pula.

Konsekuensi logis lebih lanjut atas meluasnya rasionalitas instrumental di segala bidang kehidupan adalah terjadinya "rasionalisasi", berimbas dan teridentifikasi sebagai berikut:

- (1). terjadinya perluasan-perluasan bidang sosial yang berada di bawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional, dan
- (2). terjadinya industrialisasi kerja sosial mengakibatkan norma-norma tindakan instrumental memasuki bidang-bidang kehidupan yang lain (Budi Hardiman, 1993:149). Dalam kedua kecenderungan tadi tindakan rasional-bertujuan (rasionalitas instrumental) menjadi berlaku umum.

Pada akhirnya pengertian "rasionalisasi" Weber telah menunjukkan efek-efek balik kemajuan teknik ilmiah terhadap kerangka kerja institusional masyarakat yang tercakup dalam pengertian modernisasi. Hal ini dilakukan Weber dengan menyusun teori mengenai perubahan institusional yang ditimbulkan oleh perluasan sistem-sistem tindakan rasional-bertujuan, seperti yang dilakukan oleh banyak sosiolog lain dengan menggunakan istilah-istilah berpasangan, misalnya *Gemeinschaft* dan *Gessel-*

nschaft atau solidaritas mekanis dengan solidaritas organis.

II.3. Teori Kritis Sebagai Usaha Pencerahan.

Teori Kritis adalah anak dari aliran besar tradisi intelektual yang berinspirasi kepada pikiran Marx, namun yang akhirnya paling jauh meninggalkan Marx. Mereka juga sering disebut Mazhab Frankfurt (*Frankfurter Schule*) karena mereka semula bercokol pada *Institut fur Sozialforschung* di Frankfurt am Main, Jerman. Mereka menyebut sendiri cara berpikirnya sebagai "Teori Kritik Masyarakat". Maksud teori itu adalah membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern. Yang khas dari Teori Kritik Masyarakat ini adalah bahwa mereka bertolak dari pikiran-pikiran Marx, namun sekaligus melampaui dan meninggalkan dia serta menghadapi masalah-masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif (Magnis Suseno, 1992:160).

Dalam kritiknya terhadap masyarakat industri modern, mereka memulainya dari hal yang paling mendasar yakni sebagai akibat terjadinya rasionalisasi (penerapan rasionalitas instrumental) pada segenap matra kehidupan. Krisis yang melanda masyarakat industri modern disebabkan semua tindakan sosial didasari semata-mata oleh mekanisme *mean and ends* (mekanisme alat-tujuan).

Usaha pencerahan yang dilakukan Teori Kritis terhadap

perjalanan masyarakat modern yang mereka anggap salah arah dengan dua cara:

Pertama, dengan menelusuri kembali akar-akar munculnya pola dan cara positivistik masyarakat modern dengan merefleksikan proses rasionalisasi di dalam masyarakat Barat.

Kedua, menunjukkan bahwa cara berpikir positivistik yang telah mewujudkan diri dalam sains dan teknologi berlaku sebagai ideologi (Marcuse, 1967).

Kesimpulan yang kemudian ditarik oleh Teori Kritis adalah bahwa Aufklarung telah membuahkkan *zweckrationalitat* sebagai sumber dari segala bentuk saintisme, positivisme, teknokratisme dan berbagai penindasan bentuk baru. Pandangan ini merupakan radikalisasi teori rasionalisasi Weber dengan mendapat banyak inspirasi dari George Lukase tentang reifikasi (pembendaan) yang memperoleh perumusan baru (melalui Adorno dan Horkheimer) mengenai rasio instrumental yang menguasai berbagai bidang kehidupan.

Menurut Mazhab Frankfurt rasionalisasi berarti adaptasi tindakan sosial pada aturan-aturan birokratis dan teknologis, sehingga rasionalisasi tidak kurang meminjam istilah Weber — *lost of freedom*. Yakni suatu proses menyeluruh yang menundukkan kekuatan-kekuatan produktif, pranata-pranata sosial, makna-makna kultural dan struktur-struktur kepribadian manusia di bawah

logika tindakan rasional bertujuan (rasionalitas instrumental). Sehingga seluruh dimensi material dan spiritual dihisap olehnya (Marcuse, 1967).

Adorno dan Horkheimer berupaya menguak fenomena modernisasi sebagai pengembaraan rasionalitas instrumental yang tengah terus-menerus membebaskan diri dari pesona mitis dengan melakukan penyangkalan diri untuk kembali ke dunia makna yang ternyata tak juga dicapainya.

Bagi Marcuse, rasionalisasi Weber tidak hanya merupakan suatu proses jangka panjang perubahan struktur-struktur sosial, melainkan juga merupakan "rasionalisasi" dalam pengertian Freud: yang motif sebenarnya adalah mempertahankan kekuasaan yang telah usang, disembunyikan di balik dalih-dalih imperatif tindakan rasional-bertujuan (Magnis Suseno, 1992). Sebab cara produksi kapitalistik yang disokong oleh teknokrasi menjadi mekanisme yang menjamin perluasan secara permanen sub-sistem-subsistem rasionalitas instrumental dalam masyarakat.

Pada gilirannya nanti pemecahan masalah dalam dialektika pencerahan atau paradox modernitas akan dilakukan oleh Habermas dengan menawarkan rasionalitas komunikatif sebagai jalan keluarnya. Dengan menganalisis secara cerdas teori Marx ia menggali tindakan komunikatif sebagai dimensi kedua yang melengkapi tindakan instrumental sebagai dimensi pertama. Dalam konteks yang lebih

luas. rasionalitas komunikatif tampil dan berkembang dalam argumentasi-argumentasi rasional untuk mencapai konsensus intersubyektif dan akhirnya tiba pada penyadaran bersama bahwa modernisasi seharusnya merupakan perwujudan dari rasionalitas komunikatif.

II.4. Krisis Dalam Masyarakat Teknokratis.

Untuk mencari relevansi analisis Teori Kritis dengan krisis ekonomi yang saat ini melanda sebagian negara-negara sedang berkembang, di bawah ini diuraikan secara sekilas persepsi Teori Kritis terhadap krisis yang ada dalam masyarakat teknokratis.

Yakni bahwa paradox modernitas akan membawa masyarakat pada munculnya berbagai krisis. Pengertian krisis itu sendiri bagi Habermas memiliki pengertian ganda atau memiliki dua sisi: sebagai fenomena internal dan eksternal. Krisis eksternal — misalnya krisis ekonomi — adalah belum merupakan krisis yang sesungguhnya, karena hanya merupakan gangguan disfungsional yang bisa diatasi dengan manajemen krisis.

Krisis yang sesungguhnya adalah krisis internal, yang akan terjadi kalau krisis itu dialami oleh para individu sebagai sesuatu yang mengancam identitas dan eksistensi sosial mereka dalam hubungannya dengan nilai-nilai, norma-norma dan makna-makna kultural. Krisis yang sesungguhnya terjadi kalau krisis dalam sistem industrial

kapitalis menjadi krisis identitas yang mengancam bukan hanya integrasi sistem tetapi juga integrasi sosial (problema semacam ini dalam derajat tertentu tengah terjadi di Indonesia pada saat proposal penelitian ini disusun).

Berdasarkan pemahaman di atas, Habermas menganalisis beberapa data empiris yang berhubungan dengan modernitas kapitalis di negara-negara teknokratis. Penyebab krisis dicirikan oleh mula-mula adanya intervensi yang berlebihan dari negara ke dalam kehidupan masyarakat sipil, karena dalam konteks masyarakat teknokratis negara bertugas mengatasi disfungsi-disfungsi sistemik, yang dengan cara itu negara mendapatkan legitimasi teknokratisnya. Untuk mempertahankan legitimasi tersebut negara modern mengandaikan loyalitas massa, sehingga negara melakukan intervensi terus-menerus ke dalam kehidupan masyarakat sipil atas nama "rasionalitas instrumental".

Negara yang selalu mengintervensi rakyatnya tidak akan selalu mampu menanggulangi krisis eksternal, misalnya krisis ekonomi: laju inflasi yang meningkat yang disebabkan merosotnya nilai tukar mata uang. Krisis ekonomi tadi akan menjalar ke bidang administratif birokrasi, menjadi krisis administratif. Karena pembenahan administratif dalam berbagai bentuknya, seperti regulasi dan sebagainya, pada gilirannya tidak berhasil memberi-

kan performance untuk meraih loyalitas massa yang diinginkan sebagai sumber legitimasi, oleh sebab itu krisis terus berlangsung sehingga bermuara pada terjadinya krisis legitimasi. Karena legitimasi diperoleh dari makna-makna yang memotivasi tindakan sosial individu, maka ketika loyalitas menurun terjadilah krisis motivasi. Ketika motivasi tidak lagi dimiliki rakyat terjadilah krisis yang sesungguhnya, yakni krisis internal.

Dari analisis itu bisa dipahami bahwa modernitas kapitalis tidak akan selamanya memperoleh dukungan rakyat karena potensi krisis yang ada di dalamnya. Sedangkan peta krisis pada masyarakat modern menurut Habermas sebagai berikut:

Komponen Struktur	Kebudayaan	Masyarakat	Kepribadian
Gangguan pada:			
Reproduksi Kultural	Hilangnya Makna	Krisis Legitimasi	Krisis Orientasi
Integrasi Sosial	Rasa ketidakpastian akan identitas kolektif	Anomie	Alienasi
Sosialisasi	Keterputusan dengan tradisi	Krisis Motivasi	Psikopatologi

Dengan diagnosisnya mengenai patologi-patologi dalam masyarakat teknokratis, Habermas berhasil menyatukan dimensi psikologis dan kultural dari krisis sosial ke dalam Teori Kritis (Budi Hardiman, 1993:147).

II.5. Relevansi Teori Kritis Terhadap Studi Pembangunan.

Dalam memainkan peranannya, Teori Kritis mengusik kemapanan ilmu-ilmu positif seperti ilmu ekonomi dan sosiologi 'tradisional' karena ilmu tersebut dianggap tidak mempersoalkan arah proses masyarakat, melainkan justru melancarkannya. Ilmu-ilmu tersebut tidak melakukan refleksi diri bahwa kiprahnya selama ini menghasilkan proses dehumanisasi dan de-naturalisasi. Walaupun ilmu-ilmu tersebut tampaknya rasional — dan itulah manifestasi rasionalitas instrumental (*Zweckrationalitat*) yang tidak mempersoalkan sasaran, melainkan hanya "merasionalkan" jalan ke sasaran itu — namun dalam kenyataannya ilmu-ilmu tersebut irasional karena mendukung sisten yang irasional. Sisten itu irasional sebab terjebak dalam paradoxnya sendiri tanpa mampu keluar dari keterkungungannya, atau dengan kata lain karena ilmu-ilmu tersebut tidak membahagiakan manusia karena tidak sanggup menciptakan hubungan sosial yang benar, yang sungguh-sungguh manusiawi, yakni relasi sosial yang bebas penindasan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1. Tujuan Penelitian.

1. Jika selama ini diskursus teori kritis di Indonesia masih dalam tataran akademis atau hanya muncul dalam forum-forum ilmiah dan cenderung menjadi bagian dari "*the rational world*", sementara pembangunan sebagai praktek modernisasi sudah begitu menyentuh kehidupan sehari-hari sehingga menjadi "*the real world*" maka penelitian ini dimaksudkan untuk mempersatukan kedua dimensi tersebut. Konsekuensi logis yang diharapkan adalah *the real world* memperoleh refleksinya sehingga tidak lagi bersifat a-historis, sementara "*the real world*" menemukan bumi tempat berpijaknya.
2. Dominansi ilmu ekonomi dalam studi pembangunan dan penerapannya di Indonesia selama ini sulit dibantah. Kondisi tersebut bahkan sudah mengarah pada apa yang disebut oleh Gary Becker (1990) sebagai "imperialisme ekonomi", yakni penjarahan bidang-bidang disiplin ilmu sosial yang lain oleh ilmu ekonomi yang mengaku sebagai "*the queen of social sciences*". Sejak 30 tahun terakhir para ekonom menjadikan dirinya sebagai 'master' utama pembangunan nasional dengan meninggalkan sosiolog dan ilmuwan bidang lainnya karena dianggap lebih banyak mengganggu daripada membantu.

Tetapi krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam dua tahun terakhir ini membuktikan ketidakmampuan para ekonom dengan arogansi keilmuannya untuk menjelaskan sekaligus mencari solusi guna mengatasi krisis ekonomi semata-mata menggunakan hukum-hukum ekonomi (berbagai tindakan rasional di bidang ekonomi telah diterapkan, tetapi nilai dolar justru semakin membumbung tinggi sampai pada tingkat yang tak masuk akal). Bahkan ketika krisis mencapai puncaknya pada awal 1998 ditengarai adanya "*the death of economics*". Ternyata pendekatan kritis (yang menjadi dasar logika gerakan reformasi) dan pendekatan yang multi-disipliner terbukti lebih mampu mengatasi keadaan. Berdasarkan situasi di atas maka studi dan penggalan konsep-konsep sosiologi kritis ini menemukan arti pentingnya untuk menggugat "imperialisme ekonomi" yang terjadi selama ini. Sekaligus dengan itu hasil penelitian ini diharapkan mampu mendudukan kembali fungsi dan peranan sosiologi pada tempat yang seharusnya dalam studi pembangunan di Indonesia.

3. Melalui pendekatan kritis dalam penelitian ini hendak dibongkar mitos-mitos pembangunan dan potensi krisis yang ada di dalamnya. Dengan terbongkarnya mitos-mitos dalam pembangunanisme tersebut diharapkan diperoleh percik-percik pemikiran untuk 'urun-

rembug' dalam rangka mengembalikan arah pembangunan ke "rel" yang seharusnya, yakni sebagai usaha pemanusiaan manusia.

4. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akar pemikiran atau "ideologi tersembunyi" yang mendasari teori modernisasi adalah kapitalisme-liberalisme — untuk itu menjadi hal yang menarik untuk mengkaji penerapan modernisasi di Indonesia dihubungkan dengan model kapitalisme yang kemudian muncul . Se jauh mana model yang lebih spesifik dari kapitalisme tersebut relevan dengan semangat modernisasi yang mengutamakan efisiensi dan profesionalisme subyeknya.

III.2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini tidak bermaksud menolak modernisasi, melainkan melakukan re-interpretasi berdasarkan pendekatan kritis terhadap asumsi-asumsi dasar yang melandasinya dan melakukan refleksi terhadap perilaku kapitalisme yang merupakan wujud konkrit modernisasi. Sebab seperti halnya keyakinan Habermas bahwa proyek modernisasi bukanlah suatu upaya yang gagal (sehingga perlu diganti seperti yang diasumsikan aliran Post Modernisme), melainkan sebuah proses yang mengalami stagnasi atau salah arah (terdistorsi) dan oleh sebab itu perlu dilakukan pencerahan.

Relevan dengan hal itu kontribusi yang diberikan

hasil penelitian ini adalah ikut meluruskan arah pembangunan dengan menunjukkan sasaran-sasaran baru. Jika selama ini tugas ilmu ekonomi adalah menentukan sarana-carana yang diperlukan dalam pembangunan maka tugas sosiologi adalah merumuskan sasaran-sasaran yang semestinya dicapai oleh proyek modernisasi. Dengan meminjam istilah Habermas, pembangunan di Indonesiapun memerlukan pencerahan.

Kontribusi selanjutnya yang bisa diberikan melalui penelitian ini adalah: Dengan memahami kapitalisme sebagai dasar modernisasi, akan diketahui cocok atau tidaknya model kapitalisme yang muncul di Indonesia dengan asumsi dasar dan tujuan umum modernisasi. Selanjutnya hasil analisis sosiologi kritis — khususnya Habermas — tentang patologi-patologi yang ada dalam masyarakat modern-kapitalistik dapat menjadi bahan studi yang subur untuk membantu menemukan arah bagi perkembangan masyarakat. Berbagai krisis yang melanda negara modern sejauh mungkin akan bisa dihindarkan agar negara-negara berkembang yang tengah melakukan modernisasi tidak terjebak pada kesalahan yang sama.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya adalah analisis kontekstual terhadap situasi zaman ini dengan menggunakan pisau analisis yang telah tersedia dalam wacana ilmiah sosiologi.

Pada awalnya penelitian ini berangkat dari ketertarikan kepada ide yang dilontarkan oleh C. Wright Mills dalam bukunya *Sociological Imagination* (1959) bahwa sosiologi seharusnya tidak hanya menerima fakta-fakta tetapi menafsirkan kembali makna dan nilai fakta-fakta yang dianalisisnya. Sosiolog harus mampu melihat bagaimana struktur suatu masyarakat berkaitan dengan keseluruhan perubahan lebih luas yang sedang terjadi. Ilmu-ilmu sosial harus bisa meraba keresahan dan harapan macam apa yang terjadi dan timbul dari masalah itu.

Menurut Denis H. Wrong (1977) gagasan C. Wright Mills di atas searus dengan gagasan daniel bell, Peter Berger dan Mazhab Frankfurt. Para sosiolog tersebut, menurut Magnis Suseno, ingin agar sosiologi menceburkan diri dalam persoalan dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan tidak hanya membatasi diri pada analisis teknis belaka tentang masyarakat. Mereka ingin agar sosiologi juga bisa menganjurkan perubahan masyarakat (Magnis dalam Sindhunata, 1982).

Penelitian ini berpijak pada asumsi sosiologi ekonomi bahwa kriteria dan pertimbangan ekonomi selalu melekat (*embeded*) dalam tindakan sosial individu atau kelompok masyarakat, sekaligus juga didasari oleh asumsi sosiologi budaya yang melihat kapitalisme sebagai wujud konkrit modernisasi adalah suatu kultur yang dibentuk sekaligus membentuk struktur sosial atau — dengan merujuk Berger — realitas sosial adalah hasil konstruksi sosial.

Oleh sebab itu penelitian ini meskipun mengangkat isu-isu yang bersifat teknis ekonomis tetapi lebih menekankan interpretasi historis tentang sesuatu yang mempengaruhi kultur dan menyusun struktur sosial. dalam bidang Hermeneutika pendekatan ini bisa digolongkan sebagai pendekatan re-kontekstualisasi suatu proses historis atau sebagai usaha memberi *sitz in Leben*.

Data diperoleh melalui tiga jalan:

- (1). penelusuran informasi ilmiah.
- (2). observasi langsung atas kondisi obyektif masyarakat dewasa ini, dan
- (3). melakukan konfirmasi dengan *key person* yang dianggap menguasai permasalahan yang dibahas.

Langkah-langkah metodis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, melakukan deskripsi terhadap status masalah sehingga menjadi jelas apa yang menjadi subyek penelitian, sasaran penelitian, perumusan perma-

salahan. hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama penelitian berlangsung serta menyusun struktur dan kerangka analisis. Dalam penyusunan kerangka analisis dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap luas ruang lingkup penelitian, di samping menyaring kerangka teoritik yang paling relevan dengan masalah yang hendak diteliti (membatasi jangkauan penelitian).

Kedua. melakukan penjarangan data dari berbagai wacana tertulis yang mencerminkan situasi aktual dan wacana publik menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto (Orde Baru).

Ketiga. melakukan identifikasi data yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikannya secara kategorial dan mengklarifikasinya (menjelaskan). kemudian menginterpretasikannya dan mencari koherensinya dengan kerangka analisis yang telah disusun.

Keempat. data yang telah disusun dianalisis dan diinterpretasikan (berdasarkan metode *Verstehen*) untuk kemudian dideskripsikan sebagai laporan penelitian.

Di samping langkah-langkah di atas, sejak awal penelitian dilakukan sampai laporan penelitian disusun, dilakukan langkah metodis yang disebut Koherensi Intern

dan Heuristika. Dengan koherensi intern dimaksudkan sebagai usaha untuk memahami unsur-unsur obyek penelitian dalam kerangka *internal structure* dan *external relation*-nya (Bakker, 1986). Sedangkan dengan Heuristika (Peursen, 1988) dimaksudkan agar selama penelitian dilakukan dapat ditemukan hal-hal baru sebagai hasil penelitian. Faktor Heuristika inilah yang diharapkan akan memberi ciri-ciri argumentatif hasil akhir penelitian ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Sumber Kekuasaan dan Legitimasi Orde Baru.

Negara Orde Baru (NOB) bersama beberapa negara di Asia yang lain merupakan fenomena sosial-ekonomi-politik yang menarik dan menjadi bahan kajian banyak intelektual yang menggeluti studi pembangunan. Berbeda dengan negara-negara Barat yang menggunakan proses demokrasi di bidang sosial-politik dan ekonomi dalam memajukan negaranya — yakni dengan lebih mengedepankan otonomi manusia sesuai semangat *Renaissance* dan *Aufklarung* untuk melawan otoritarianisme-feudalisme — beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, justru menggunakan cara-cara yang birokratis-otoriter dan cenderung anti demokrasi dalam menerapkan pembangunan sebagai wujud keinginan menjadi negara modern.

Antara tahun 70-an hingga pertengahan 90-an terjadi pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan dari negara-negara yang disebut sebagai "macan Asia" dan fenomena ini bagi pengamat Barat sering disebut sebagai "*the Asian Miracle*". Di Indonesia sendiri tercatat beberapa keberhasilan yang dicapai pemerintah Orde Baru dalam pembangunan ekonomi khususnya. Pertama adalah keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam menciptakan swa-sembada pangan (beras). Keberhasilan ini penting untuk dicatat jika dibandingkan dengan pernah terjadinya antrian panjang pembelian beras murah

pada masa Orde sebelumnya, sebab pemerintah pada waktu itu belum mampu menyediakan pangan yang memadai bagi rakyat. Keberhasilan ini juga memiliki arti penting sebab berkorelasi dengan kemampuan untuk menjaga stabilitas politik mengingat kurang tersedianya pangan seringkali menjadi pemicu terjadinya keresahan sosial.

Keberhasilan kedua yang dicapai rezim Orde Baru adalah pada semakin meluasnya akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Usaha yang dilakukan sejak Pelita II telah cukup membushkan hasil pada akhir Pelita V, sekurang-kurangnya secara kuantitatif, dengan semakin menurunnya angka kematian bayi dan semakin meningkatnya warga yang bebas dari buta-huruf. Secara empiris juga dirasakan keberadaan Puskesmas di setiap kecamatan, Posyandu di setiap desa/kelurahan dan semakin banyaknya SD Inpres di seluruh pelosok wilayah Indonesia seiring dengan diintrodukirnya program Wajib Belajar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan keberhasilan ketiga adalah di bidang kependudukan yang menyangkut kemampuan pemerintah Orde Baru menurunkan jumlah penduduk miskin, yakni yang semula pada awal 1970 tercatat 70 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan menjadi 'hanya' 25 juta pada akhir 1995.

Pendekatan pragmatis dalam penerapan teori modernisasi oleh rezim Orde Baru selama 30 tahun di bidang ekonomi juga telah menunjukkan hasil empiris yang cukup berhasil.

Kebangkrutan ekonomi nasional yang diwariskan pemerintahan Soekarno telah berhasil diatasi. tingkat laju inflasi bisa ditekan hingga dua digit. Ekonomi nasional sejak awal 70-an dibangun dengan bantuan besar-besaran dari negara-negara maju (Barat) dan dibukanya lebar-lebar pintu bagi masuknya modal asing yang menandai Indonesia — merujuk Berger — menempuh "jalan kapitalisme". Industri dan sektor dunia usaha digenjut secara pesat sehingga, khususnya dalam penciptaan infrastruktur perekonomian Indonesia secara makro, perekonomian nasional melesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4-6 % pertahun.

Fenomena keberhasilan pertumbuhan ekonomi dari kondisi inflasi 500 % di akhir tahun 60-an menjadi kurang dari 10 % rata-rata pada tahun 80-an tentu tak lepas dari berbagai trik, strategi dan manajemen modernisasi yang diterapkan. Beberapa teori modernisasi yang diadopsi lebih merujuk pada model pertumbuhan ekonomi berdasarkan paradigma ekonomi neo-klasik. Beberapa model tersebut di antaranya adalah model yang diformulasikan oleh Arthur Lewis yaitu model pembangunan dalam situasi adanya surplus tenaga kerja, model lima tahapan dari Rostow, model dorongan gencar (*big push*) dari Rosenstein Rodan, model pertumbuhan yang tak seimbang (*unbalanced growth*) oleh Hirschman dan model lingkaran tak berujung (*vicious circle*) dari Nurkse (Sritua Arief, 1995).

Model-model ini menumpukan pertumbuhan ekonomi seba-

gai tujuan pembangunan dalam pengertian memaksimalkan produk nasional dimana faktor sentral dalam proses menuju pencapaian tujuan pembangunan adalah faktor modal. Berbagai formulasi yang dirujuk ini sama sekali tidak mempertimbangkan masalah-masalah sosial seperti penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, distribusi pendapatan dan kekayaan dan dampak teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Kerangka teoritis yang dikemukakan tidak mempertimbangkan aspek kelembagaan dan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang eksogen. Di dalam masyarakat akan terjadi suatu proses yang harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh strata masyarakat melalui apa yang dikenal sebagai mekanisme tetesan ke bawah (*trickle-down mechanism*). Jika sebagian masyarakat berhasil berkembang ekonominya dan mencapai kesejahteraan yang cukup tinggi maka dengan sendirinya perkembangan ekonomi dan kesejahteraan ini akan menyebar dan menetes kepada bagian masyarakat yang lebih luas.

Kepercayaan yang berlebihan terhadap mekanisme efek menetes ke bawah tersebut memacu pemerintah Orde Baru untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi arus masuk modal asing dan mendorong sektor swasta dalam negeri untuk mengembangkan berbagai usaha skala besar dengan memberikan berbagai kemudahan baik dalam hal modal maupun perijinan. Karena pada awal 70-an lapisan masyarakat, yang secara historis, memang sudah siap dengan dunia bisnis adalah

kaum pengusaha golongan Cina, maka terjadilah kolaborasi antara sekelompok pengusaha Cina yang bertindak sebagai pelaku pasar, kelompok birokrasi yang mempermudah gerak bisnis kelompok pertama dan militer yang bertugas mengatasi gejolak sosial yang potensial mengganggu stabilitas keamanan yang merupakan prasyarat utama masuknya modal asing. Hasilnya adalah tumbuhnya perekonomian nasional secara makro yang ditopang oleh gejala konglomerasi, yakni terpusatnya berbagai bidang dan sektor usaha di tangan segelintir pengusaha yang memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah. Tercatat hanya sekitar 30 keluarga berhasil menguasai 70 % kekayaan nasional yang berwujud pangsa pasar, permodalan dan aset-aset produktif nasional. Keadaan ini, mulai pertengahan 80-an, yang pada mulanya dirasakan oleh masyarakat luas sebagai ketidakadilan ekonomi semakin dirasakan pula — sebagai dampak ikutan gejala konglomerasi — menjadi ketidakadilan di bidang sosial. Hal ini nampak dari semakin meningkatnya "biaya sosial" (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, misalnya munculnya *high cost economy*, rusaknya lingkungan, semakin melebarnya kesenjangan kaya-miskin (*vicious dualism*) dan munculnya praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sementara dalam rangka mempertahankan paradigma pertumbuhan — yang kemudian terbukti gagal — hak-hak politik rakyat dimarginalisasikan (dicabut dan diberangus) demi tetap terjaganya stabilitas nasional atau

dalam arti kata yang lain demi tetap berputarnya roda produksi industrialisasi.

Berbagai kritik tajam atas praktek pembangunan di negara berkembang banyak dilontarkan baik oleh para analis/teoritisi maupun para praktisi pembangunan di berbagai lembaga internasional (IMF, Worldbank, ILO, Unicef) dan berbagai NGO luar negeri maupun LSM di dalam negeri. Kritik ini tercermin pada berbagai tulisan tentang studi pembangunan dari Myrdal (1973), Seers (1969), dan Stewart (1985). Mereka menganjurkan agar masalah pembangunan di negara berkembang hendaklah dianalisis dalam dimensi yang lebih luas dengan mengikutsertakan disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain utamanya sosiologi, antropologi, sejarah dan ilmu politik. Berseiring dengan ini tolok ukur pembangunan hendaknya bukan hanya ditunjukkan oleh Produk Nasional Bruto per kapita, tetapi juga didasarkan oleh tiga kriteria yang lain yakni: berkurangnya kemiskinan absolut, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan dan mengecilnya tingkat pengangguran (Seers, 1979). Internasional Labour Organization (ILO) pada 1976 memperkenalkan konsep kebutuhan dasar manusia setelah melihat kenyataan empirik bahwa proses pembangunan di dunia ketiga tidak menyentuh kelompok 40 % terbawah dari jumlah penduduknya bahkan malah memperhebat kesenjangan kaya-miskin. Denis Goulet (1971) menyodorkan konsep tentang harga diri dan kebebasan sebagai nilai inti (*core values*) pembangunan. Harga diri

kan menimbulkan respek antara masing-masing warga dan antara bangsa yang satu dengan yang lain sedangkan kebebasan menyangkut kebebasan dari ketakutan, kebebasan bersuara, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan dan bebas dari ketergantungan baik antar warga dan terutama antara bangsa yang satu dengan yang lain. Goulet lebih menekankan pentingnya makna kerjasama.

Berbagai kritik atas pembangunan tersebut bukannya tidak ditanggapi oleh penguasa di negara berkembang. Terdapat sebagian (besar) elite yang memang memandang kritik atau perbedaan pendapat sebagai penghalang eksistensi mereka sebagai "keompok yang mengatur" sehingga memperlakukan perbedaan pendapat tersebut sebagai subversi dan bukannya sebagai suatu cara masyarakat memastikan pertimbangan yang paling mungkin dari serangkaian panjang pilihan kebijakan. Tetapi tetap terdapat sebagian teknokrat di Indonesia yang masih menggunakan akal sehatnya dan mencoba merevisi arah pembangunan, misalnya dengan mengadopsi konsep kebutuhan dasar dalam konsep KFM (kebutuhan fisik minimum) dan UMR (upah minimum regional) serta melalui program pengentasan kemiskinan (IDT atau Inpres Desa Tertinggal) dan berbagai program-program yang lain. Sebagian program ini cukup efektif tetapi lebih banyak program yang tak mencapai sasaran dan tidak mengubah konstelasi perekonomian nasional yang ada sebab berbagai *vested interest* yang terlanjur menggurita seiring dengan

terlalu lamanya kekuasaan dipegang oleh kelompok kepentingan tertentu telah menciptakan mentalitas kolektif yang tak sesuai dengan tuntutan modernisasi. Hal yang terakhir ini bisa dipahami dengan jelas berdasarkan analisis struktural dari Prebisch dan Eurtado menjelang pertengahan 90-an.

Menurut Prebisch dan Eurtado proses akumulasi ekonomi dan perubahan sosial-ekonomi di negara berkembang — yang notabene adalah negara bekas jajahan — dimulai karena pengaruh eksternal dari negara-negara kapitalis yang menjajah, yakni dengan diintrodusirnya sektor ekspor bahan-bahan mentah dalam struktur ekonomi negara-negara jajahan yang khusus diciptakan untuk menopang ekspansi sektor industri di Barat. Pada saat terjadi krisis ekonomi di negara-negara penjajah pada abad ke-19, sektor ekspor bahan-bahan mentah dari negeri-negeri jajahan telah dijadikan sebagai salah satu komponen untuk memecahkan masalah krisis ekonomi tersebut.

Mengingat pentingnya sektor ekspor ini maka kemudian diatur sedemikian rupa agar sangat menguntungkan untuk garapan investasi modal asing yang salah satunya adalah dengan menekan upah buruh agar biaya utama modal tetap bisa diminimalkan. Sementara itu di sektor ekonomi rakyat terjadi proses penentuan harga yang monopsonistik terhadap komoditi yang dihasilkan rakyat dan di lain pihak terjadi pula proses penentuan harga yang bersifat sepihak terhadap

barang-barang yang dibutuhkan rakyat. Keseluruhan proses pertukaran ini menunjukkan hubungan ekonomi yang dialektis dan bersifat eksploitatif. Dalam keseluruhan sistem ekonomi di negeri jajahan, dan bersifat menerus ketika berstatus sebagai bekas jajahan, akhirnya membentuk pola distribusi pendapatan dan pola distribusi penguasaan sumber-sumber ekonomi yang sangat timpang. Struktur masyarakat terdiri dari sekelompok kecil penduduk yang berpendapatan tinggi dan massa rakyat yang miskin. Kelompok kecil penduduk herpenghasilan tinggi ini sadar atau tidak sadar merupakan kelas komprador yang melakukan kegiatan untuk pihak asing. Pemikiran neo-strukturalis selanjutnya menyebutkan bahwa intervensi pemerintah ternyata tidak menjamin berlangsungnya suatu proses pembangunan yang dinamis untuk masyarakat luas, sebab dalam tubuh pemerintah telah berkembang suatu mentalitas yang destruktif dengan mendistorsi harga sebagai akibat meluasnya hak-hak istimewa (*privileges*) kepada kelompok pelaku ekonomi tertentu. Pemberian hak-hak istimewa ini kemudian menimbulkan terbentuknya konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan sekelompok orang yang dengan kekuasaan ekonomi bekerjasama dengan klik-klik politik tertentu, menjelma menjadi monopolis-monopolis dan oligopolis-oligopolis. Pembentukan harga komoditas berlangsung dalam suasana ketidaksempurnaan pasar yang luar biasa.

Akibat pemberian hak-hak istimewa maka melembagalah

mentalitas pengusaha yang lebih menginginkan terus hidup dari rente ekonomi. Aktor-aktor ekonomi yang meresapi *rentier mentality* ini tidak merupakan kelas pengusaha yang tangguh. Mereka inilah yang merupakan pendukung struktur kekuasaan yang telah menyuburkan kesempatan mereka untuk meraih rente ekonomi secara leluasa. Maka tidak mengherankan jika rezim Orde Baru mampu berkuasa selama seperempat abad lebih sebab para "kapitalis rente" di sekitar elite penguasa akan berusaha semaksimal mungkin agar patron-patron mereka tetap berkuasa sebab menyangkut kelangsungan hidup bisnis mereka, salah satu usaha mereka adalah memberikan dukungan finansial yang sangat besar kepada partai yang berkuasa khususnya setiap masa kampanye.

Kemampuan rezim Orde Baru untuk tetap mampu mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari seperempat abad dalam pandangan Nasikun (1998) sekurang-kurangnya berakar pada empat sumber utama, yakni:

Pertama, klientelisme ekonomi yang berhasil dilakukan berkat melimpahnya sumber daya ekonomi dari "boom" minyak pertengahan 70-an dan dengan menguras sumber daya alam seperti tambang emas, tembaga dan aluminium (PT Freeport) di Irian dan pulau-pulau lainnya serta terkurasnya hasil hutan di sebagian besar hutan Kalimantan.

Kedua, keleluasaan rezim Orde Baru menggunakan mekanisme kekerasan, kekerasan militer maupun kekerasan hukum.



Besarnya kekuasaan militer di semua lini kehidupan dan dibentunya lembaga-lembaga militer non-reguler seperti Opsus dan Kopkamtib semakin mempermudah penguasa untuk mengatur ketakutan rakyat demi menuntut loyalitas. Kekerasan militeristik ini ditopang dengan kekerasan hukum yang dikendalikan melalui peradilan yang dikontrol pemerintah.

Ketiga, melalui politik bahasa dilakukan ideologisasi definisi partikularistik terhadap segala kehidupan bernegara untuk melegitimasi otoritarianismenya. Definisi yang bersifat sepihak demi kepentingan penguasa ini menyangkut diantaranya definisi tentang demokrasi Pancasila, hak azasi manusia, tanggungjawab warga negara ("mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi") dan lain-lain telah membangun legitimasi politik rezim Orde Baru secara moral. Legitimasi ini diperoleh dengan mempermainkan standar moralitas, dan bukannya memperbaiki diri untuk memenuhi standar moralitas tertentu yang secara universal berlaku. Lebih jauh lagi penggunaan politik bahasa ini sebagai instrumen penghalusan tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kedaulatan rakyat dan stigmatisasi terhadap tindakan-tindakan rakyat yang dianggap sebagai perlawanan terhadap kebijakan dan kekuasaan pemerintah.

Keempat, adanya jaringan korporatisme negara yang meny-

lurkan' (memanipulasi dan mengendalikan) partisipasi masyarakat menjadi mobilisasi politik yang terkontrol. Korporatisme pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya untuk menekan pertentangan-pertentangan kelas atau kelompok-kelompok kepentingan melalui pembentukan organisasi korporatik yang memiliki dua tujuan: untuk memelihara harmoni antara penguasa dan massa rakyat dan untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan penguasa memiliki pengaruh langsung dan besar dalam proses politik.

Kekuasaan yang sentralistik, hegemonik dan nyaris tak tersentuh oleh kritik bahkan cenderung reaksioner terhadap kritik, telah membentuk karakter politik yang otoritarian dan manakala menjadi patron bagi kelompok pelaku ekonomi tertentu menciptakan suatu model ekonomi yang khas yang sering disebut oleh sementara pengamat sebagai kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) (Kunio, 1988), kapitalisme rente (*rent capitalism*) (Torngquist, 1990) dan dalam diskursus yang terbaru disebut sebagai kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*), yang mengawinkan watak-watak paling dasar dari dua sistem ekonomi yang dalam analisis Marx merupakan dua tahap dari perkembangan suatu masyarakat, yakni: sistem kapitalisme dan feodalisme (Nasikun, 1998: 4). Sisi gelap yang merupakan watak umum kapitalisme muncul berupa kecenderungannya untuk terus melakukan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi kapital di atas kesenjangan bangunan

struktur pemilikan alat-alat produkei dan distribusi pendapatan. Sementara feodalisme menyumbangkan sifat otoriter, paternalistik dan kecenderungan untuk melakukan dominasi. Perkawinan kedua sistem ini berarti pula perkawinan antara kekuatan kapital dengan kekuasaan politik.

Dengan demikian sistem ekonomi yang muncul bukan kapitalisme yang mengikuti hukum-hukum pasar bebas melainkan kecenderungan kapitalisme yang terdistorsi atau dikendalikan kekuasaan yang terkonsentrasi di antara kelompok (klik-klik) militer, kaum teknokrat yang cenderung menjadi 'kapitalis-birokrat' dan kelompok pengusaha oligopolistik yang secara bersama-sama dengan restu pemerintah bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional (kapitalisme global: baik yang merupakan swasta murni seperti MNC (*multi national corporation*) maupun lembaga-lembaga internasional yang merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan negara-negara industri maju seperti IMF, World Bank, APEC, GATT dan sebagainya).

V.2. Berbagai Paradox dalam Pembangunanisme Orde Baru.

Jika pembangunan adalah suatu usaha manusia secara rasional untuk keluar dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan terhadap sesuatu di luar dirinya, maka ketika pembangunan menjadi sebuah ideologi yang bersifat memaksa dan menundukkan segala hak-hak dan kepentingan individu maka dengan sendirinya usaha untuk

membangun tadi menjadi irasional. Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan dan menafikan biaya-biaya sosial yang muncul dengan sendirinya justru merupakan proses pembodohan, pemiskinan dan menciptakan ketergantungan yang lebih besar lagi dari individu kepada suatu institusi yang bernama: negara.

Terjadi pembodohan karena warga negara tidak lagi mampu (karena tidak lagi boleh) menggunakan nalarnya sendiri untuk menentukan apa-apa yang menjadi kebutuhannya secara mandiri. Semua yang dibutuhkan warga negara baik fisik maupun non-fisik (misalnya kebebasan) seolah-olah sudah tercakup dalam berbagai program yang ditawarkan dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek yang telah ditentukan secara sepihak oleh negara. Para teknokrat menyusun program dan melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) ibarat dokter ahli bedah yang tengah bekerja pada tubuh pasiennya yang tengah tak sadarkan diri.

Pembodohan juga bisa berarti pula hilangnya "kearifan lokal" (*local genius*), misalnya di bidang pengobatan penyakit dan di bidang hudi-daya tanaman pertanian. Bisa pula berupa hilangnya akar-akar budaya lokal sehingga warga yang dimodernkan mengalami alienasi dan anomie karena tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan alam kebudayaan modern.

Selanjutnya seiring dengan proses modernisasi yang membawa nilai-nilai baru baik di bidang sosial maupun

ekonomi, maka tolok ukur (standar penilaian) terhadap banyak hal juga berubah. Kriteria miskin atau kaya, berkecukupan atau kekurangan juga cenderung berubah seiring munculnya gaya hidup dan perubahan berbagai tolok ukur mengenai kehidupan khususnya dari segi material. Kemiskinan secara kultural jadi bersifat relatif. Bisa jadi meskipun telah dilakukan berbagai proyek pembangunan di suatu komunitas yang muncul hasilnya adalah orang-orang yang merasa lebih miskin jika digunakan kriteria yang baru.

Terjadinya ketergantungan karena warga negara tidak lagi punya pilihan bebas untuk menentukan berbagai hal yang menjadi prioritasnya. Semua pilihan dalam hampir semua segi kehidupan (pilihan politik, cita rasa dan apresiasi budaya, pemenuhan kebutuhan pokok, jumlah pemilikan anak bahkan sampai pada pilihan alat kontrasepsi) telah diatur sedemikian rupa oleh berbagai peraturan perundang-undangan maupun penentuan kriteria dan harga-harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan untuk memilih telah dikerangkeng oleh berbagai aturan yang tak boleh ditolak rakyat.

Jika maksud baik dari pembangunaisme adalah mengupayakan pilihan-pilihan yang paling rasional bagi warga negara berdasarkan logika "maximisasi" dan skala prioritas berdasarkan mekanisme "*mean and ends*", maka — dengan merujuk Weber — penciptaan pilihan-pilihan yang didasari

oleh rasio instrumental tersebut akan menjadi kerangkeng besi (*iron cage*) bagi warganya. Sebab seperti yang dikatakan para pemikir Mazhab Frankfurt: rasionalisasi berarti adaptasi secara terpaksa perilaku warga negara pada aturan birokratis dan teknologis dari sistem teknokratis. Dengan demikian pembangunanisme mengakibatkan *lost of freedom*, yakni proses menyeluruh yang menundukkan kekuatan-kekuatan produktif, pranata-pranata sosial, makna-makna kultural dan struktur-struktur kepribadian manusia di bawah aturan-aturan yang semata-mata didasari rasionalitas instrumental.

Gejala yang begitu kasat mata yang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru, misalnya birokrasi telah muncul sebagai sekelompok masyarakat berseragam pegawai yang tidak melayani masyarakat akan tetapi sebagai penguasa yang "mengutip" uang rakyat sambil tetap menampilkan dirinya sebagai sosok yang arogan karena merasa berhak. Birokrasi yang merupakan representasi aparatus negara menjadi bagian terdepan dari penampilan yang tidak punya sensitifitas terhadap rakyat. Mereka adalah kelompok yang paling tidak mampu berbedha pendapat serta di tangan mereka ideologi bangsa menjadi ideologi kelompok sementara sebaliknya konsep pembangunan yang merupakan konsep sekelompok elite dijadikan sebagai ideologi bangsa, yakni sebagai pembangunanisme. Pembangunan yang bermula adalah sebuah konsep dengan banyak pilihan dijadikan ideologi tunggal.

yang menindas pikiran kreatif dan tindakan yang berbeda dengan konsep itu. Lebih parah lagi, ideologi nasional yang mestinya menjadi payung bagi kegiatan bernegara dijadikan perisai dan alat pemukul bagi orang-orang yang berbeda pendapat tersebut.

Berbagai kasus aktual lain yang menunjukkan kepada kita bahwa pembangunanisme yang menjadi bersifat ideologis akan membawa kita ke situasi yang paradoxal, antara lain: kebebasan untuk berekspresi telah dikurung oleh lembaga perijinan sedemikian rupa sehingga koridor lembaga perijinan menjadi kawat berduri yang memisahkan antara warga negara dengan negara yang menjadi miliknya.

Di bidang pertanian, pembangunan yang menjadi bersifat ideologis (pembangunanisme) juga menciptakan situasi paradoxal. Revolusi hijau yang dianggap sebagai formula manjur untuk meningkatkan hasil pangan dengan melakukan teknologisasi pertanian dan penerapan input teknologi kimiawi telah memabat habis pengetahuan dan kearifan lokal para petani yang tumbuh sejak berabad-abad lalu. Padahal revolusi hijau adalah modernisasi pertanian yang didisain oleh perusahaan multi nasional (baca: kapitalisme internasional) yang melibatkan lembaga riset raksasa dunia seperti IRRI (*International Rice Research Institut*) di Filipina, IMMYT (*International Maize and Wheat Improvement Centre*) di Mexico dan 13 lembaga riset semacam yang dikelola oleh CGIAR (*the Consultative Group for Intern-*

tional Agriculture Research). Lembaga-lembaga itu tak lain tujuannya adalah mereduksi cara bertani yang beraneka ragam menjadi astu cara produksi sesuai rekomendasi mereka (Anharudin, 1993: 68).

Cara produksi pertanian para petani di dunia Ketiga yang telah berlangsung hampir 5000 tahun — dengan memilih dan menanam kembali bibit-bibit mereka sendiri yang didasarkan atas kearifan klimatologis lingkungannya — telah diporak-porandakan oleh Revolusi Hijau. Para petani tidak lagi memproduksi bibit sendiri, karena bibit sudah menjadi milik korporasi multinasional dan karena bibit lokal petani dianggap "primitif" dan "inferior" oleh ideologi teknologi modern yang berakar pada kapitalisme. Padahal bibit lokal petani telah bertahun-tahun terbukti tahan hama, sementara bibit unggul bukan saja tidak tahan hama tetapi juga memunculkan hama baru. Varietas IR-8 (1968) menderita hama tahun 1969 dan tahun 1972 hama "tungro" menghancurkan IR-8. IR-20 sebagai pengganti IR-8 terkena Wereng Coklat di tahun 1973 sedangkan IR-26 juga terkena hama baru.

Dampak lanjutan dari Revolusi Hijau adalah pada mekanisme penawaran-permintaan pupuk dan pestisida yang dibutuhkan petani. Dengan varietas baru berarti diperlukan jenis pupuk dan pestisida yang baru dan kedua hal ini segera menjadi kooditas baru yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang semata-mata mengejar profit. Melalui

bekerja sama dengan birokrat di departemen pertanian dan birokrasi tingkat kecamatan dan desa, para pengusaha pupuk dan pestisida secara sepihak menentukan harga produk mereka secara monopsonistik, sehingga seringkali hasil panen tak sebanding dengan biaya tanam dan biaya pemeliharaan tanaman.

Dampak lebih jauh lagi sebagai akibat modernisasi dan pembangunanisme pertanian, di Jawa khususnya, terjadi konsentrasi pemilikan lahan. Para petani gurem yang tak mampu mengakomodasi biaya tanam dan pemeliharaan yang menjadi begitu mahal, memilih menjual tanahnya ke petani berlahan luas yang akomodatif, atau kepada para "spekulan" orang kota, yang juga menyewakan tanahnya kepada petani pengusaha. Maka yang terjadi adalah marginalisasi dan polarisasi. Para petani yang kemudian menjadi "landless" kemudian harus menjual tenaganya sebagai buruh murah di kota-kota sebab peluang kerja di desa telah diganti oleh mesin-mesin pertanian yang justru dimiliki orang berpunya. Demikian juga tenaga kerja wanita di pedesaan yang semula bisa menjadi "penderep" atau melakukan kegiatan bercocok tanam yang lain terpaksa menganggur dan sebagian dari mereka mencari pekerjaan di kota sebagai buruh industri, pembantu rumah tangga atau terpaksa menjadi pelacur di kota. Terbukti secara statistik bahwa yang mendekati 50 % tingkat pengangguran adalah di sektor pertanian.

Paradox modernitas juga muncul dalam masalah peneri-

maan, pengelolaan dan pengembalian bantuan luar negeri. Hal ini terkait erat dengan konsep dasar modernisasi yang pada mulanya memang sebagai "paket bantuan" dari negara-negara industrial-kapitalis — sebagai rekayasa yang dimaksudkan untuk membendung pengaruh sosialisme-komunisme di negara-negara ketiga — yang berisi teori (berikut asumsi asumsi ideologisnya), cara penerapan, konsultan ahli dan suntikan modal berupa pinjaman jangka panjang. Tanpa bantuan yang lengkap tersebut mustahil negara-negara miskin yang baru merdeka bisa melaksanakan modernisasi, sebab di samping tak memiliki pengetahuan dan tenaga terampil yang cukup juga tak tersedianya modal untuk menciptakan sarana dan prasarana bagi modernisasi tersebut.

Dengan memilih "jalan kapitalisme" maka mengalir modal ke negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Akan tetapi dengan terlalu lamanya Orde Baru berkuasa sehingga mengekalkan *vested interest* para elitnya serta dengan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme, mengakibatkan pengelolaan utang luar negeri menjadi tidak efisien. Ditengarai oleh Sumitro Joyohadikusumo terjadi inefisiensi utang luar negeri sampai 30 %. Terlalu banyaknya *vested interest* dan lemahnya mekanisme kontrol menjadikan banyak program yang dibiayai utang luar negeri tersebut hasilnya tidak bisa maksimal, bahkan banyak yang salah sasaran.

Di pihak lain ideologi modernisasi telah mematok keyakinan seolah faktor bantuan luar negeri menjadi suatu keniscayaan dalam melaksanakan proses modernisasi. Hal ini bisa dilihat pada meningkatnya secara signifikan dari tahun ke tahun besarnya utang luar negeri Indonesia. Besarnya cicilan utang luar negeri (cicilan pokok ditambah bunganya) dari tahun ke tahun, dimulai 1986, lebih besar dari utang baru yang diterima setiap tahun anggaran baru. Utang luar negeri Indonesia sampai dengan 1994 tercatat US\$ 87,6 miliar dengan total utang swasta sebesar US\$ 30 miliar. Rata-rata 42,28 % dari anggaran pembiayaan digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya. Dalam catatan Sritua Arief dan Arief Budiman (1987) diketahui sepanjang periode 1970-1986 dalam setiap tahun rata-rata hampir 90 % dari persediaan sumber pembiayaan hasil transaksi luar negeri Indonesia telah dibayarkan kepada pihak asing. Karena hasil perdagangan luar negeri (ekspor-impor) tidak bisa diharapkan untuk menyelamatkan anggaran belanja negara, maka bantuan luar negeri menjadi alternatif pilihan pembiayaan pembangunan.

Biasanya di belakang segala bantuan atau pinjaman asing selalu terdapat prasyarat untuk menggunakan tenaga konsultan asing, teknologi dan peralatan serta hak jual hasilnya yang telah ditentukan oleh pihak negara donor. Dalam kasus pinjaman bilateral Jepang, 79 % dari dana bantuan tersebut akan mengalir kembali ke Jepang. Selama

kurun waktu 1973-1990, secara kumulatif arus investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia mencapai US\$ 5.8 miliar. Pada saat yang sama keuntungan yang diraih dan dibawa keluar dari Indonesia dalam bentuk laba oleh investor asing mencapai US\$ 58.9 miliar. Ini berarti: untuk setiap US\$ 1 yang dibawa investor ke Indonesia akan diikuti dengan keluarnya US\$ 10.19 dari perekonomian Indonesia (Dedi Haryadi, 1995: 105). Hal ini bisa dilihat sebagai terjadinya transfer kapital atau pemindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Dalam hal ini terjadi paradox ketika keinginan menambah modal justru diikuti oleh larinya modal yang lebih besar dan dengan begitu bantuan justru menjadi beban.

Implikasi penting utang luar negeri adalah terjadinya ketergantungan negara penerimanya terhadap negara donor. Hal ini bukanlah semata-mata masalah moneter atau perhitungan antara jumlah pinjaman dan jumlah pengembalian. Di balik "jasa baik" pemberian utang luar negeri, negara-negara donor menginginkan negara-negara kreditur menjadi ladang subur penanaman modal perusahaan-perusahaan mereka, bahkan sekaligus untuk menempatkan tenaga-tenaga kerja mereka. Sudah bisa dipastikan secara logika ekonomi, negara-negara donor akan memprioritaskan proyek-proyek pembangunan yang dapat menunjang kantong-kantong industri dan perdagangan mereka, yang sebagian dengan tidak memperdulikan pengorbanan masyarakat. Maka cukup beralasan jika

Teresa Hayter (1972) menyebut bantuan luar negeri sebagai "imperialisme terselubung".

Atas nama pembangunan, agenda pertumbuhan ekonomi suatu negara berkembang ditentukan atas skenario dan intervensi lembaga-lembaga moneter internasional. Negara-negara maju selaku pemegang saham mayoritas di World Bank misalnya, dapat memaksakan agenda kepentingan mereka ke dalam kebijakan pemerintah negara berkembang. Jadi bantuan luar negeri menjadi alat untuk mengikat negara peminjam dalam "kerangkeng" ekonomi yang diciptakan negara donor sehingga para debitur ini bisa mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya bagi kepentingan perusahaan mereka sedemikian rupa. Utang luar negeri menjadi alat imperialisme modern yang cukup efektif untuk menguasai perkembangan sekelompok masyarakat oleh masyarakat lain (Dianto Bachriadi, 1995: 5). Situasi paradoknya adalah ketika kondisi ini tidak disikapi secara kritis maka negara-negara berkembang, khususnya dalam wacana ini Indonesia, secara sadar maupun tidak sadar telah mengorbankan kesejahteraan rakyatnya sendiri dan bahkan juga pada gilirannya mengorbankan pembangunan itu sendiri.

Refleksi dari berbagai kondisi paradox modernitas di atas adalah apabila semangat manusia untuk pertama kalinya di masa *Renaissance* dan *Aufklarung* (abad ke-14 dan ke 17) adalah ingin bebas dari belenggu feodalisme, tradisionalisme, ortodoksi dogma-dogma agama dan berbagai penin-

dasar atas kebebasan berpikir dan bertindak mereka telah membawa negara-negara Barat menjadi bangsa modern dan kemudian mentransformasikan pengalaman kemajuan mereka atas nama program modernisasi bagi negara-negara dunia ketiga. Sementara menghadapi program modernisasi tersebut negara-negara dunia ketiga menanggapi dengan semangat yang sama untuk lepas dari berbagai belenggu, baik belenggu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketergantungan kepada bangsa lain. Tetapi ketika modernisasi sudah diterapkan dan menjadi modernisme, ketika pembangunan dilaksanakan dan cenderung menjadi pembangunanisme; terjadilah paradox modernitas. Negara-negara berkembang kembali terjebak pada ketergantungan bentuk baru, pembodohan, penindasan (baik oleh bangsa sendiri maupun secara tak langsung oleh bangsa lain yang lebih maju) dan mitos kemiskinan yang tak juga segera hilang.

Melalui modernisasi, bangsa Barat ingin meraih kebebasan tetapi yang kemudian diraih justru belenggu birokrasi dan berjalannya sistem sosial-ekonomi yang didasari oleh rasio instrumental; sedangkan bangsa-bangsa yang sedang berkembang justru terjebak oleh ketergantungan dan mitos-mitos pembangunanisme.

V.3. Kapitalisme Kroni dan Krisis dalam Pembangunan.

Bersamaan waktunya dengan mulai bangkitnya Orde Baru, di tingkat global pada era 70-an tengah berkembang wacana "sistem pembagian kerja internasional baru" di bidang hubungan-hubungan produksi dan pertukaran internasional yang dipicu oleh gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi, stagnasi industrial dan perubahan-perubahan akumulasi, transfer dan investasi kapital di negara-negara maju. Hal tersebut memunculkan ide "*Industrial redeployment*" yakni pengalihan atau relokasi proses produksi industri-industri dari negara-negara maju ke negara-negara dunia ketiga (Nasikun, 1993: 11-12).

Proses yang kemudian berseiring dengan proyek modernisasi-kapitalisasi di negara-negara berkembang ini kemudian menghasilkan suatu bentuk kapitalisme yang oleh Kunitz (1988) disebut sebagai "kapitalisme semu" (*ersatz capitalism*), oleh Tornquist (1990) sebagai "kapitalisme rente" (*rent capitalism*) dan yang dalam wacana di Indonesia dewasa ini disebut "kapitalisme perkoncoan" (*crony capitalism*). Proses terjadinya model kapitalisme perkoncoan ini dipicu oleh 'simbiosis mutualisme' antara penguasa dan pengusaha. Di satu pihak oleh negara dilakukan dua hal: pertama, eksploitasi sektor tradisional (khususnya pertanian) untuk menyediakan dua hal yang sangat penting bagi sektor modern (industri), yakni komoditi pangan dan tenaga kerja buruh murah. Kedua, pembentukan korporatisme negara

dimana semua organisasi sosial dengan secara efektif dikendalikan oleh negara, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan rezim sementara sistem ekonomi dikelola secara bersama oleh kelompok militer, kaum teknokrat dalam birokrasi negara dan keluarganya (nepotisme). Sementara di pihak pengusaha dilakukan cara-cara yang kolusif dengan menyogok jajaran birokrasi pemerintah yang sebagian besar bermental korup.

Jika diamati secara selintas, sistem ekonomi Indonesia tampak lebih bercorak non-kapitalistik. Hal ini terlihat, disamping tertulis secara formal dan menjadi amanat konstitusi yang menekankan ekonomi kerakyatan, pada dibentuknya beberapa perusahaan negara seperti BULOG dan PERTAMINA serta didirikannya koperasi-koperasi. Namun, seperti yang ditengarai Sarbini Sumawinata (1989), dilihat dari pokok-pokok sikap dan politik ekonomi dan hasil-hasilnya maka pada dasarnya ekonomi Indonesia bersifat kapitalistik. Hal ini didasari oleh alokasi sumber dayanya yang ditentukan oleh: pertama, tingkat pemerataan sumber daya yang ditentukan oleh negara dan kedua, penguasaan alat-alat produksi.

Karakter kapitalisme di Indonesia semakin jelas manakala penghargaan tertinggi justru diprioritaskan kepada para pengusaha (kaum borjuis) sebagai produsen "surplus value" dengan strategi pertumbuhan yang dilancarkan melalui koalisi kuat dari para perencana

(teokrat), penyedia dana (investor), pengusaha keturunan Cina dan keluarga pejabat sebagai pelaksana bisnis dengan didukung militer sebagai penjaga ketertiban. Berhadapan dengan koalisi semacam ini rakyat tak memperoleh tempatnya dalam struktur ekonomi nasional. Dalam konteks ini negara Orde Baru bersikap ambivalen terhadap konstitusi yang jelas sosialis. Dengan merujuk Clause Offe, di satu pihak negara harus mempertahankan proses akumulasi modal dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi oleh sektor-sektor swasta; sementara pada kenyataannya dia juga harus mempertahankan kredibilitas sebagai perantara dari kepentingan-kepentingan kelas yang ada sehingga dilegitimasi rakyat. Karakter ini merupakan ciri negara kapitalistik (Arief Budiman, 1990).

Berger dan Luckman menyatakan bahwa perilaku ekonomi perorangan maupun kelompok tidak pernah lepas dari etos sosial yang melingkupinya, dan suatu etos tidaklah muncul secara tiba-tiba melainkan telah dipupuk dan dikondisikan oleh lingkungan sosialnya dalam waktu yang relatif lama. Dengan demikian institusi ekonomi yang terbentuk merupakan hasil kreasi sosial (*social creation*) yang terjadi secara perlahan; yakni sebagai cara melakukan sesuatu yang "mengeras" dan "mengental" dan akhirnya menjadi kiat dalam melakukan sesuatu (Berger dan Luckman, 1990: 233). Dalam realitas konkritnya setiap perilaku ekonomi adalah bentuk perilaku sosial yang dikondisikan dalam dan oleh situasi

sosial tertentu (Granovetter dan Swedberg, 1992: 6-19).

Sebagai konsekuensi logisnya maka tidak akan pernah ada suatu bentuk kapitalisme yang monolitik atau kapitalisme yang hanya memiliki 'satu wajah'. Akan terdapat berbagai macam varian kapitalisme yang manifestasinya tergantung dari pola-pola interaksi sosial, sistem nilai (*value system*) dan kebudayaan setempat dimana kapitalisme itu bertumbuh. Dengan kata lain sistem kapitalisme selalu di-*embedded* (dilekati atau memiliki akar) sistem budaya setempat. Meskipun demikian terdapat ciri umum yang menandai kapitalisme, yakni: (a). sebagai sistem produksi massal yang (b). diorganisasikan dan dijalankan secara modern untuk kepentingan pasar dengan (c). prinsip "rasionalitas instrumental" (dalam arti pencarian profit secara rasional dan sistematis) dan (d). berlandaskan skema alat-tujuan (*mean and ends schema*) yang menyangkut kepemilikan alat produksi dan relasi sosial yang diakibatkannya.

Kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*) adalah salah satu model spesifik kapitalisme di negara berkembang, khususnya Indonesia, yakni suatu bentuk kapitalisme yang mengalami distorsi oleh praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sifat-sifat yang meng-*embedded* kapitalisme di Indonesia ini pada gilirannya nanti terbukti membawa negara ini ke jurang krisis ekonomi dan krisis multi-faset yang berkepanjangan.

Korupsi telah menjadi masalah laten di Indonesia, sebab korupsi yang terjadi dan berkembang sepanjang Orde Baru berkuasa bukan lagi sekedar motivasi individual melainkan sebagai korupsi yang melembaga (*institutionalized corruption*) atau korupsi yang bersifat sistemik (*systemic corruption*). Perilaku korupsi yang pada mulanya merupakan anti nilai setelah melalui dialektika budaya — merujuk Berger, yakni mengalami internalisasi, subyektivasi dan obyektivasi — telah menjadi nilai, menjadi sesuatu yang dijadikan rujukan karena telah menjadi bagian dari kultur yang massif. Pada kenyataannya korupsi dalam berbagai bentuknya telah menggejala mulai dari tukang parkir, birokrasi tingkat desa hingga di pusat kekuasaan.

Dari segi ekonomi, korupsi secara langsung menyebabkan "*high cost economy*". Biaya siluman yang harus dikeluarkan pengusaha bisa mencapai 30 % dari biaya produksi. Akibatnya pengusaha tidak punya alternatif lain selain menaikkan harga produksi dan mengurangi biaya produksi melalui berbagai jalan, termasuk dengan mengeksploitasi buruh-buruhnya. Di jajaran birokrasi bentuk korupsi bisa berupa kontrak-kontrak pembelian dan pengadaan barang yang di *mark-up* sehingga menyebabkan pembelian negara mengalami *overpriced* atau barang yang dikirim bernilai lebih rendah dari yang seharusnya (Hetifah Saefudian, 1990: 17).

Berbagai faktor penyebab yang bisa disebut sebagai latar belakang melembaganya kultur korupsi ini adalah:

(1) secara ekonomi terdapat *gap* yang terlalu besar antara *supply* dan *demand* terhadap berbagai jasa dan pelayanan, adanya politik perizinan dan lisensi yang tidak transparan oleh instansi pemerintah, adanya *gap* antara status sosial pegawai pemerintah sebagai "*ambtenaar*" dengan tingkat gaji yang relatif rendah dibandingkan dengan kelas menengah pengusaha yang sedang tumbuh serta adanya asumsi yang keliru tentang konsep "koneksi" di tingkat hubungan sosial. (2) Secara politik karena tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memberantas praktek korupsi, bahkan ditengarai korupsi menjadi salah satu kiat dalam mempertahankan *status quo* dalam bentuk "manajemen bagi-bagi rejeki". (3). Secara hukum karena adanya standar ganda dalam penerapan hukum dan adanya mafia peradilan dimana hakim, jaksa dan pembela adalah person-person yang bisa dibeli. (4). Secara kelembagaan karena terlalu banyaknya peraturan, ketidakjelasan prosedur, lemahnya moralitas pimpinan dan terutama lemahnya (dilemahkannya) kontrol masyarakat.

Kolusi adalah suatu praktek bisnis yang terjalin melalui hubungan yang saling menguntungkan antara cukong (umumnya pengusaha Cina) dengan para pejabat pemerintah (umumnya yang berlatar belakang militer). Mulai Soeharto di puncak pimpinan, para Jendral di lingkaran inti istana, pangdam, gubernur, hingga pejabat pemerintah eselon bawah. Ditengarai Soeharto telah menjalankan perilaku kolusif

sejak ia masih menjadi Pangdam Divisi Diponegoro Jawa Tengah di masa pemerintahan Soekarno.

Sistem ekonomi yang terjalin melalui pola hubungan "cukongisme" merupakan hubungan timbal balik. Pengusaha Cina memiliki uang, sedangkan para pejabat pemerintah mengandalkan diri pada pemberian proteksi dan fasilitas melalui pengaruh kekuasaan yang mereka miliki. Sebagai imbalan atas pemberian fasilitas dana kepada patron politiknya, para pengusaha Cina tersebut mendapat perlindungan politik dan keamanan, bebas dari beban pajak tertentu, memperoleh fasilitas dana segar dari perbankan karena direkomendasi, maupun akses terhadap lisensi perdagangan. Berbekal aliansi bisnis yang terjalin dengan para birokrat pemerintah para konglomerat Cina akhirnya memperoleh akses yang cukup mapan dalam perolehan kredit, informasi pasar maupun kontrak-kontrak dengan pihak investor luar negeri. Maka munculah nama-nama konglomerat non-pribumi yang besar berkat fasilitas penguasa, seperti Liem Sioe Liong, Eka Cipta Wijaya, Prayogo Pangestu, Mochtar Riyadi, Tan Siong Kie, The Nin King, Bob Hasan dan Suhargo Gondokusumo. Meskipun sebagai kelompok minoritas mereka tidak memiliki akses politik yang berarti, namun berkat fasilitas ekonomi yang begitu besar pada gilirannya mereka punya pengaruh politik yang cukup besar.

Nepotisme adalah praktek diikutsertakannya anggota keluarga pejabat dalam sistem industri dan perdagangan,



baik sekedar sebagai kongsi dari perusahaan milik orang lain yang dekat dengan pejabat tadi maupun sebagai pemilik perusahaan itu sendiri. Mulai dari sentral kekuasaan (presiden) hingga pejabat struktural berbagai lembaga pemerintah hingga tingkat daerah banyak melakukan praktek nepotisme ini. Jika sang bapak menjadi presiden maka anak-anaknya akan mendirikan berbagai perusahaan yang sebagian di antaranya untuk menampung proyek-proyek pembangunan yang ditandatangani bapaknya selaku pejabat pemerintah, dan karena presidennya melakukan hal semacam itu maka bawahannya mulai dari menteri, pangdam, gubernur, bupati hingga lurah melakukan praktik yang sama. Apologi yang selalu dilontarkan oleh para pejabat ini ketika disorot oleh pers dan masyarakat selalu berlindung pada "hak perseorang" untuk berbisnis; para pejabat ini bersikap hipokrit dengan pura-pura lupa bahwa jabatannya sangat berpengaruh kepada bisnis anak-anaknya, baik dalam hal tender ataupun fasilitas-fasilitas. Feodalisme yang masih mengakar dalam perilaku sosial masyarakat Indonesia mengakibatkan lebih banyak bawahan yang takut menolak proyek-proyek keluarga atasannya (karena sikap *ewuh-pekewuh*) ketimbang yang memiliki integritas pribadi untuk berani menolaknya.

Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kapitalisme perkoncoan yang secara ekonomi menciptakan *high cost economy*, bagi rakyat dirasakan pada tingginya harga-harga

komoditas untuk berbagai keperluan sehari-hari, sulitnya mencari peluang berusaha sebab hierarki distribusi barang dan jasa serta peluang usaha dan industri dari hulu ke hilir telah dirambah para kroni penguasa. tidak adanya ruang sosial (*social space*) untuk bersaing secara sehat baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi sebab ketiadaan koneksi dan rekomendasi, mampetnya saluran-saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi politik karena institusi politik yang ada terkooptasi oleh negara, dan kesenjangan yang semakin melebar antara yang miskin dan yang kaya semakin melukai rasa keadilan rakyat banyak.

Pada akhirnya sebuah kekuasaan yang dibangun di atas berbagai skandal dengan sendirinya akan membusuk dan seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran kritis masyarakat kekuasaan tersebut semakin kehilangan legitimasinya; sehingga tinggal menunggu momen yang tepat bagi keruntuhannya. Momen tersebut muncul dengan terjadinya krisis moneter yang melanda beberapa negara berkembang di Asia pada akhir 1997. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi-faset di Indonesia menunjukkan bahwa fundamental politik dan fundamental ekonomi negara Orde Baru sesungguhnya sangat rapuh.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa negeri ini akar permasalahannya terutama terletak pada ketidakmampuan lembaga-lembaga keuangan, swasta dan pemerintah, dalam mengelola dan memanfaatkan dengan baik utang luar negeri

untuk hal-hal yang produktif (terutama memproduksi produk-produk yang mampu menghasilkan devisa). Utang swasta Indonesia yang pada 1995 masih sekitar US\$ 38 miliar, pada awal terjadinya krisis moneter tercatat mencapai US\$ 75 miliar. Parahnya utang-utang itu tidak dipergunakan untuk usaha-usaha yang berorientasi ekspor, tetapi justru digunakan untuk membangun gedung perkantoran, apartemen, pusat pertokoan (mall), bisnis multi media dan pabrik petrokimia yang sebagian besar pengajuan kreditnya menggunakan *mark up*. Sebagian besar usaha tersebut terbukti tidak mampu menciptakan keuntungan secara cepat sementara utang kebanyakan adalah utang jangka pendek yang segera jatuh tempo. Pada saat utang tersebut harus segera dilunasi secara serentak terjadilah hukum *suplay and demand* terhadap dollar sebagai alat pembayaran, sehingga jatuhnya nilai rupiah yang dampak susulannya masih terasa hingga kini, yakni hancurnya ekonomi rakyat.

Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara Orde Baru sesuai dengan ancaman Habermas yang menyatakan bahwa: negara yang selalu mengintervensi rakyatnya tidak akan selalu mampu menanggulangi krisis eksternal yang akhirnya akan bermuara pada terjadinya krisis internal dan hilangnya legitimasi rakyat. Terbukti bahwa berbagai paradox modernitas yang mengantarkan negara Orde Baru ke krisis multi-faset yang dipicu oleh krisis ekonomi akhirnya bermuara pada hilangnya legitimasi rakyat dan hangk-

rutnya kekuasaan negara.

Ketidakmampuan negara Orde Baru mengatasi krisis ekonomi (sebagai krisis eksternal) akibat laju inflasi yang meningkat, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan inefisiensi birokrasi kemudian menjalar ke bidang administratif menjadi krisis administratif. Karena pembenahan administratif dalam berbagai bentuknya seperti regulasi, deregulasi dan seterusnya pada gilirannya tidak berhasil memberikan *performance* untuk meraih loyalitas massa yang diinginkannya maka krisis terus berlanjut menuju krisis legitimasi.

Sedangkan pada tingkat *grassroot* terjadi krisis internal. Hancurnya ekonomi rakyat, ketidakpastian kondisi sosial dan hilangnya harapan akan perbaikan nasibnya dirasakan oleh individu rakyat sebagai sesuatu yang mengancam identitas dan eksistensi sosial mereka. Dalam tabaran yang lebih luas terjadilah ketidakpastian nilai-nilai, norma-norma dan makna-makna kultural dan ambruknya kesepakatan-kesepakatan sosial. Krisis identitas ini menjadi ancaman bukan hanya bagi integritas sistem tetapi juga integrasi sosial. Yang terakhir ini bermula pada perombakan beberapa norma dan aturan bernegara serta pecahnya integrasi bangsa (merdekanya Timor Timur dan tuntutan merdeka dari berbagai wilayah di Indonesia).

Terjadinya krisis legitimasi terhadap kekuasaan negara dimana basis legitimasi tersebut diperoleh dari

loyalitas rakyat, sementara loyalitas itu sendiri telah hilang karena terjadinya krisis motivasi yang meluas, maka yang tinggal adalah saat-saat kebangkrutan kekuasaan Orde Baru; orde yang selama seperempat abad lebih menciptakan ketakutan bagi sebagian besar rakyatnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setidaknya sejak Perang Dunia Kedua konsep "modernisasi" dan "pembangunan" muncul sebagai dasar teori bagi perubahan sosial di negara-negara Dunia Ketiga. Keinginan untuk menjadi bangsa yang maju menjadikan konsep tersebut sebagai "ideologi" bagi negara-negara Dunia Ketiga dalam mengembangkan dirinya; memecahkan kemiskinan, kebodohan dan segala atribut keterbelakangan.

Gagasan modernisasi dan pembangunan secara historis dilatarbelakangi oleh suatu usaha membendung semangat anti-Kapitalisme yang dikampanyekan oleh blok Sosialis di negara-negara Dunia Ketiga. Gagasan ini secara resmi muncul ketika Amerika mengumumkan doktrin kebijakan luar negerinya pada 1949 yang secara eksplisit menggunakan istilah "*development*" dan "*underdevelopment*" sebagai bahasa resmi. Jadi konsep pembangunan pada dasarnya merupakan refleksi paradigma Barat tentang perubahan sosial untuk diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga.

Karena sejak awalnya merupakan usaha untuk mencegah meluasnya paham Sosialisme, maka ideologi tersembunyi yang terdapat dalam konsep pembangunan adalah ideologi Kapitalisme-Liberalisme. Dengan demikian sebagai konsekuensi logisnya negara-negara Dunia Ketiga yang kemudian melaksanakan program pembangunan dengan merujuk teori modernisasi

telah mengambil "jalan Kapitalisme", sementara Kapitalisme itu sendiri secara *sui generis* — berdasar analisis sosiologi Kritis — mengandung potensi krisis di dalamnya.

Keinginan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan penerapan konsep modernisasi dan praktik pembangunan, di Indonesia, menjadikan penguasa Orde Baru menerapkan berbagai langkah-langkah implementasi modernisasi yang cenderung represif dan mengabaikan kritik dan partisipasi rakyat banyak. Terjadi perilaku politik yang "menyimpang" dari jalur demokrasi dan perilaku ekonomi yang juga "menyimpang" dari karakter asli kapitalisme pasar bebas, yakni mendistorsinya dengan perilaku KKN (kolusi, korupsi dan Nepotisme) dari jajaran birokrasi dan elite kekuasaan sehingga menciptakan kapitalisme perkoncoan.

Potensi krisis dalam kapitalisme yang dalam melakukan maksimisasi keuntungan, akumulasi modal dan *mode of production*-nya bersifat eksploitatif dan yang dalam ekspansi kulturalnya didasari "rasio instrumental, membawa sistem produksi-industrial kapitalistik kepada situasi paradox modernitasnya. Paradox modernitas ini menggejala dalam berbagai bentuk (hasil) penerapan teori modernisasi di Indonesia. Berbagai gejala yang mencerminkan paradox modernitas ini berpadu dengan perilaku kekuasaan dan perilaku ekonomi Orde Baru yang korup mengantarkan bangsa ini kepada terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang

berkepanjangan selanjutnya menciptakan krisis multi-faset yang akhirnya bermuara pada krisis legitimasi dan bangkrutnya kekuasaan Orde Baru.

Agar 'peristiwa naas' yang menimpa Orde Baru dan menyengsarakan sebagian besar rakyatnya ini tidak diulangi oleh orde-orde selanjutnya dalam sejarah panjang bangsa Indonesia ke depan, maka perlu dilakukan koreksi terhadap rasionalitas formal pelaku ekonomi di Indonesia. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh intervensi struktural dari sebuah pemerintahan yang transparan dan demokratis dalam mekanisme pasar. Suatu pemerintahan yang *concern* terhadap terbentuknya suatu masyarakat terbuka (*open society*) yang mengakui rakyat sebagai subyek utamanya. Tetapi hal itu saja belum cukup tanpa adanya intervensi dari elemen-elemen kekuatan pro-demokrasi yang tidak terlibat aktivitas akumulasi modal. Elemen-elemen pro-demokrasi ini adalah segenap potensi rakyat seperti lembaga swadaya masyarakat, intelektual yang berpikiran merdeka dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga*. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Arndt, H.W.. 1992. *Pembangunan Ekonomi, Studi tentang Sejarah Pemikiran*, Jakarta, LP3ES.
- Bakker, Anton. 1986. *Ilmu-ilmu Sosial yang Menempatkan Manusia Sebagai Subyek*, Yogyakarta, Fakultas Filsafat.
- Berger, Peter L., 1969. *The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York, Doubleday Anchor Book.
- , 1878. *Pyramids of Sacrifice*. New York, Anchor Press.
- Bernstein, R.J., (ed.). 1985. *Habermas and Modernity*. Oxford, Polity Press.
- Budiman. Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta, Gramedia.
- Giddens. Anthony. 1985. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Jakarta, UI Press.
- Habermas. Jurgen , 1974. *Toward a Rational Society*, London, Heinemann.
- , 1884. *The Theory of Communicative Action*. Boston, Beacon Press.
- , 1987. *The Philosophical Discourse of Modernity*, Massachuset, MIT Press.
- , 1990 . *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta, LP3ES.

- Hardiman, Budi, 1990, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta, Kanisius.
- _____, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Johnson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mills, C. Wright, 1959, *The Sociological Imagination*, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Book Ltd.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Karya.
- Nasikun, 1999, *Menuju Pembangunan Pluralisme, Lokalisme dan Kembalinya Komunitas Politik*, makalah seminar, Yogyakarta, P3PK - UGM.
- Rifai, Bachtiar Tb., 1986, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, Jakarta, Gramedia.
- Saefudian, Hetifah, dan Juni Thamrin, (ed.), 1995, *Menyingkap Retorika dan Realita, Refleksi dan Visi Jejak 50 Tahun Indonesia*, Bandung, Akatiga.
- Scahs, Wolfgang, (ed.), 1994, *Kritik Atas Pembangunanisme, Telaah Pengetahuan Sebagai Alat Penguasaan*, Jakarta, CPSM.
- Sindhunata, 1982, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Jakarta, Gramedia.
- Soetrisno, Loekman, 1996, *Menuju Masyarakat Transformatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Tlm Redaksi Driyarkara, 1993, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Weiner, Myron, (ed.), 1977, *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*, Yogya, Gadjah Mada University Press.

CURICULUM VITAE

KEPALA PROYEK PENELITIAN :

1. Nama Lengkap : Drs. Edy Herry Pryhantoro.
2. Umur/Jenis Kelamin/Agama : 33 tahun/Pria/Islam
3. Alamat Fakultas : FISIP Universitas Airlangga
4. Pangkat/Golongan/NIP : Asisten Ahli/III b/132009468
5. Jabatan Pokok : Dosen
6. Kesatuan/Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya
7. Alamat Kantor : Jln. Airlangga 4-8 Surabaya.
8. Riwayat Pendidikan Tinggi :

No.	Macan Pendidikan	Tempat	Tahun	Bidang	Titel
1.	S-1 UGH, Fak. Filsafat	Yogya	1984/ 1980	Filsafat Sosial	Drs.
2.	S-2 UGH Ilmu Sosial	Yogya	1997	Sosiologi	MSi.

PENGALAMAN PENELITIAN :

No.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER BIAYA	KETERANGAN
01.	1988	<u>Pengaruh Konsumtivismen Terhadap Pola Pikir dan Gaya Hidup Mahasiswa di Yogyakarta.</u>	DIRJEN-DIKTI	Juara I Nasional LKIP di Jakarta.
02.	1992	<u>Tingkat Pendidikan Wanita Pekerja Sektor Informal dan Determinasinya Terhadap Orientasi Pengembangan Pendidikan Anaknya.</u>	DIP-OPF Lemlit-UNAIR	Ketua Peneliti.